

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023



**SEKRETARIAT DAERAH
2018**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6

2.1.1 Peran Sekretariat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 6

2.1.2 Susunan Organisasi 6

2.1.3 Uraian Tugas..... 10

2.1.4 Standar Operasional Prosedur 13

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 19

2.2.1 Sumber Daya Manusia 19

2.2.2 Sarana dan Prasarana 24

2.3 KINERJA PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH 29

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 40

2.4.1 Tantangan 40

2.4.2 Peluang: 41

BAB IIPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih..... 3

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 4

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 4

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 5

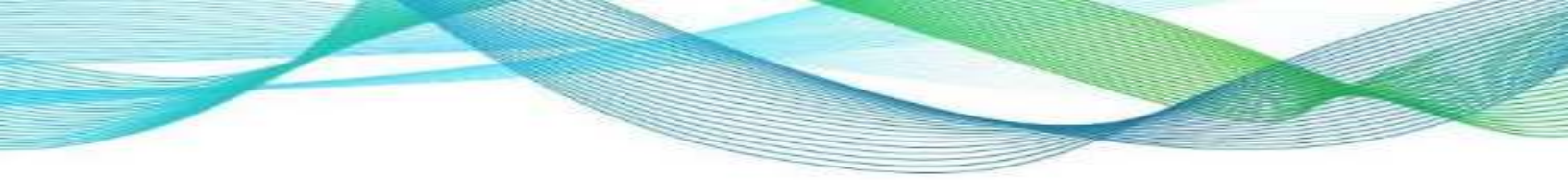
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN 1

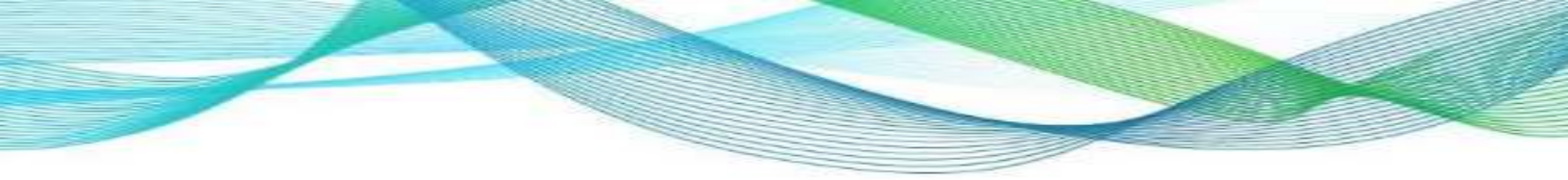
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1

Bab VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 1

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 1

Bab VIII PENUTUP..... 1





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

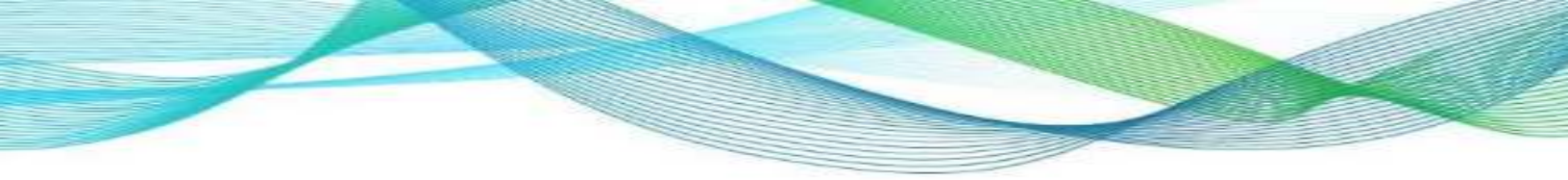
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun kedepan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Bekasi.

Proses penyusunan Rencana Strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi meliputi:

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- 2) Penyusunan rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- 3) Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- 4) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi; dan
- 5) Penetapan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi.



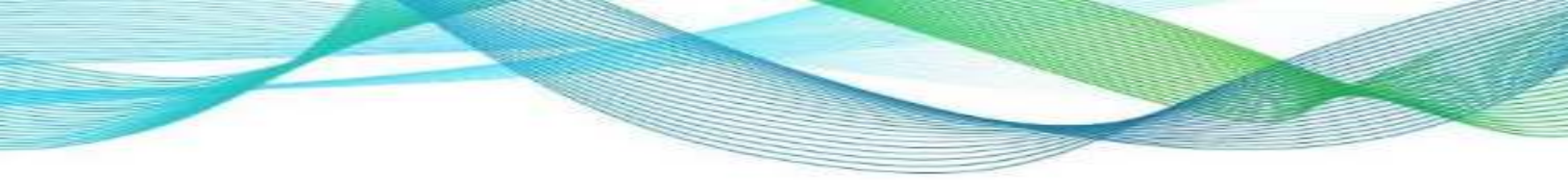
Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kota Bekasi, RPJMD Kota Bekasi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi. Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- 
- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Seri A Nomor 16)
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Seri E Nomor 03);
 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri D Nomor 07);
 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Seri E Nomor 10);
 14. Peraturan Wali Kota Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya suatu keterkaitan, kesinergisandengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran,

serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan oleh Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

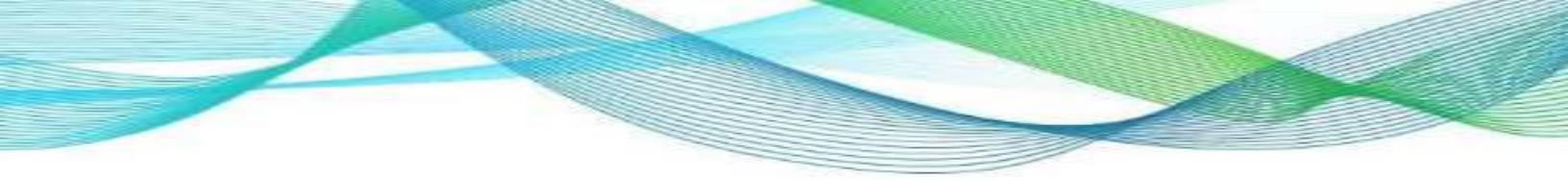
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

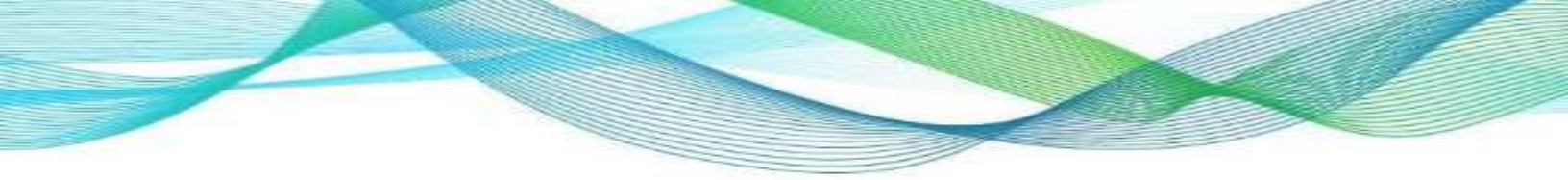
2.1.1 Peran Sekretariat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

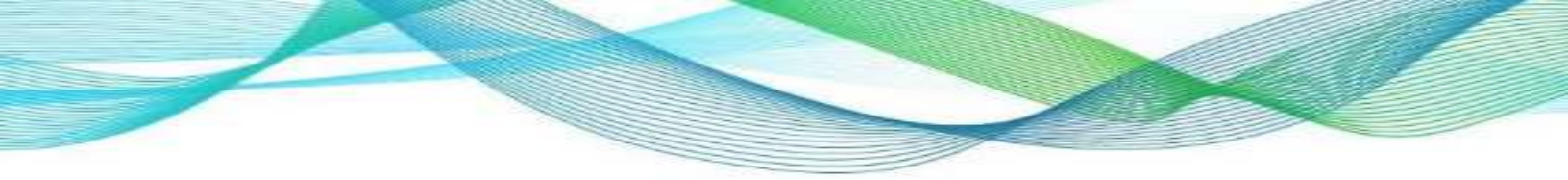
Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
5. pelaksana pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
6. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Susunan Organisasi

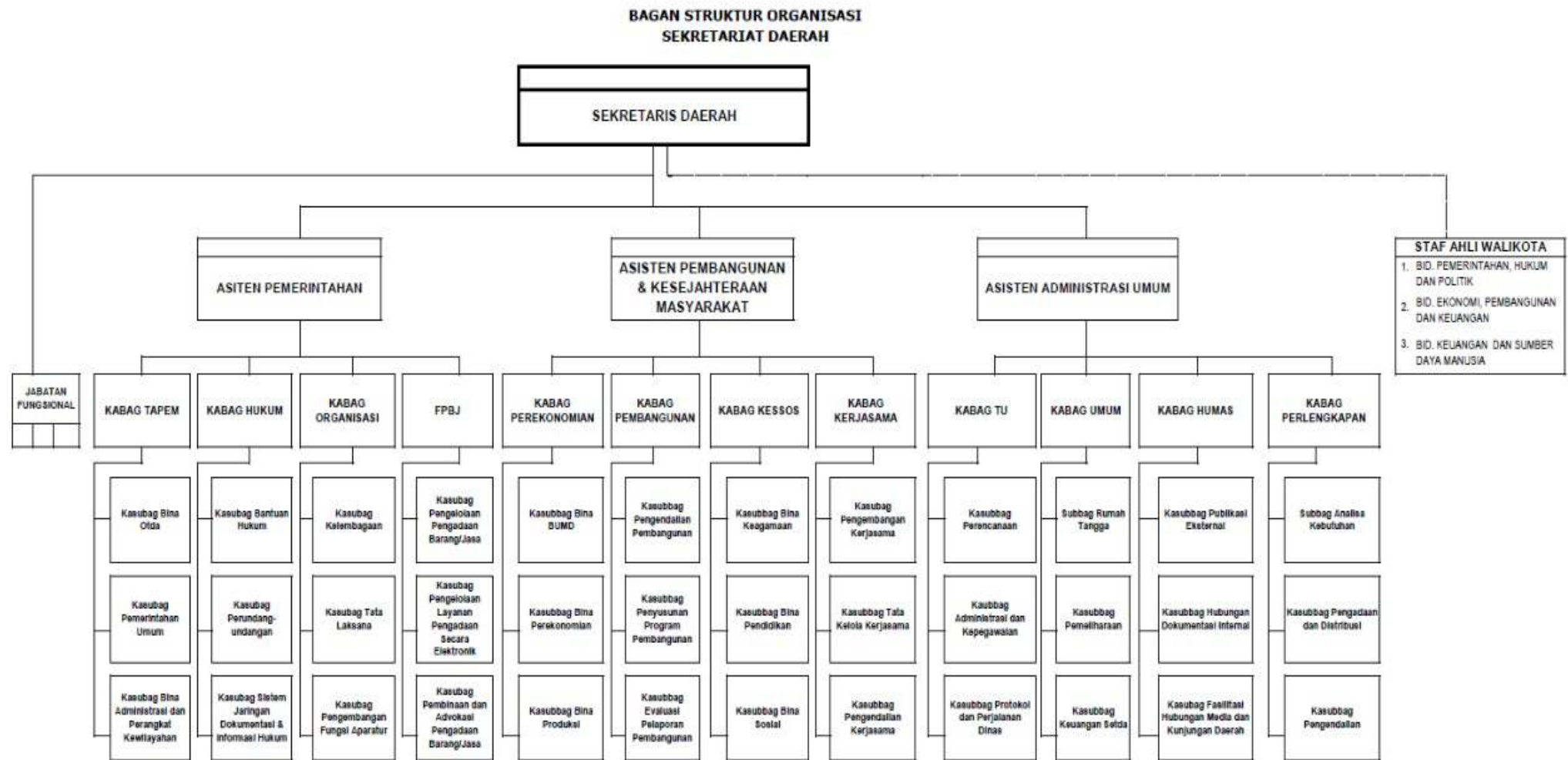
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) terdiri dari :

- 
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - c. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
 - d. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - c) Sub Bagian Bina Administrasi dan Perangkat Kewilayahan.
 - 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - c) Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tatalaksana;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Fungsi Aparatur.
 - 4. Bagian Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya dan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - c) Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
 - f. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi;
 - c) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - 2. Bagian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Pembangunan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Sosial;
 - b) Sub Bagian Bina Keagamaan;

- 
- c) Sub Bagian Bina Pendidikan.
 - 4. Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Tata Kelola Kerjasama;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Kerjasama.
 - g. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - c) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3. Bagian Humas, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Publikasi Eksternal;
 - b) Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal;
 - c) Sub Bagian Fasilitasi Kunjungan Daerah.
 - 4. Bagian Perlengkapan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
 - c) Sub Bagian Pengendalian.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi



2.1.3 Uraian Tugas

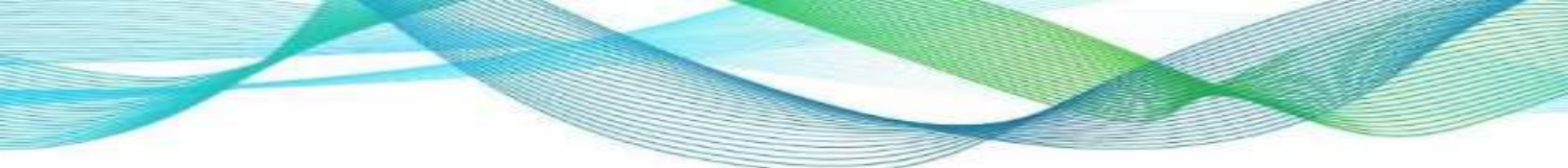
Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

A. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Setda;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum;
- c. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- d. Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- f. Pembinaan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah;
- g. Pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga lainnya;
- i. Perumusan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota;
- j. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota;
- k. Penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kinerja Setda sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;

- 
- b. Penyusunan dan perumusan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah lingkup tata pemerintahan, hukum dan organisasi serta fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. Pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
 - d. Pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur Perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
 - e. Penyiapan bahan rekomendasi pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan pengkajian terhadap rancangan konsep penyempurnaan, bina otonomi daerah, manajemen Pemerintahan umum serta bina administrasi dan peningkatan kinerja perangkat kewilayahan;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan Daerah dan produk hukum lainnya serta sosialisasi peraturan perundangundangan lingkup bidang tugasnya serta penyelesaian dan konsultasi permasalahan hukum;
 - h. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis organisasi perangkat Daerah, dan ketatalaksanaan serta pengembangan fungsi aparatur;
 - i. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - j. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota atau Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya;
 - k. Penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.
- C. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;
 - b. Penyusunan dan perumusan bahan rencana strategis dan rencana kerja Setda lingkup perekonomian, pembangunan, kesejahteraan sosial dan kerjasama;
 - c. Pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
 - d. Pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur Perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;

- e. Penyiapan bahan rekomendasi pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya;
- f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perekonomian;
- g. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
- h. Penyusunan kebijakan, pengoordinasian, pelayanan administratif dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta Posdaya;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan program kesejahteraan sosial;
- j. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kerjasama;
- k. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota atau Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya;
- l. Penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

D. Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyusunan dan perumusan bahan rencana strategis dan rencana kerja Setda lingkup umum, tata usaha, humas serta perlengkapan;
- c. Pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur Perangkat Daerah menurut bidang tugasnya;
- e. Penyiapan bahan rekomendasi pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rumah tangga, pemeliharaan dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, administrasi dan kepegawaian serta protokol dan perjalanan dinas lingkup setda;
- h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kehumasan publikasi eksternal, dokumentasi internal dan fasilitasi kunjungan daerah;
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perlengkapan;

- j. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota atau Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya;
 - k. Penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.
- E. Staf Ahli mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan telaahan permasalahan sesuai lingkup bidangnya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan Asisten dan Perangkat Daerah sesuai lingkup bidangnya;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - e. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Staf Ahli sesuai dengan bidangnya.
- F. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

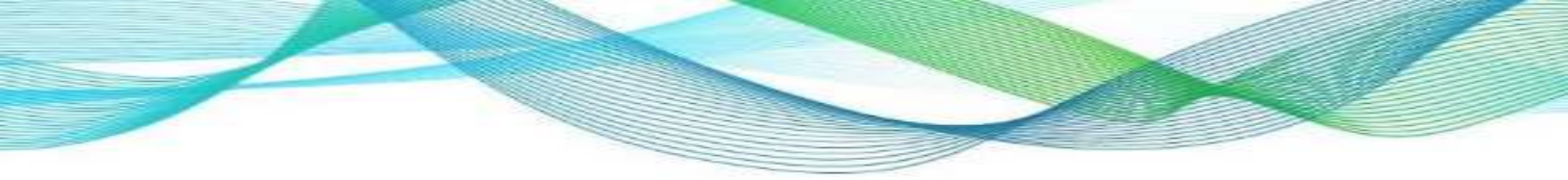
2.1.4 Standar Operasional Prosedur

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor PER/21/M-PAN/11/2008, Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan untuk mengurangi kesalahan dan kelalaian pegawai, meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Standar Operasional Prosedur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

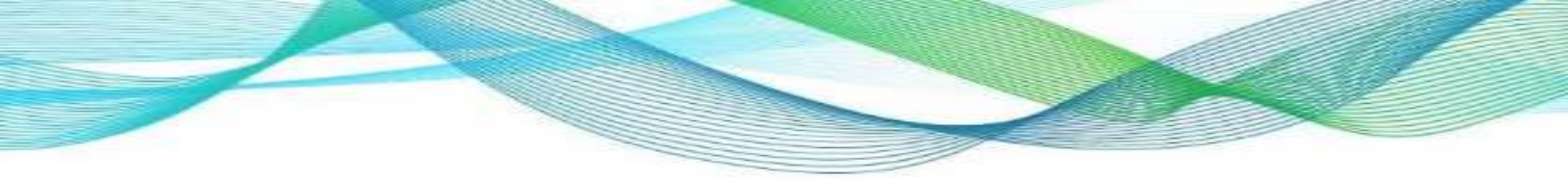
Tabel II.1

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)

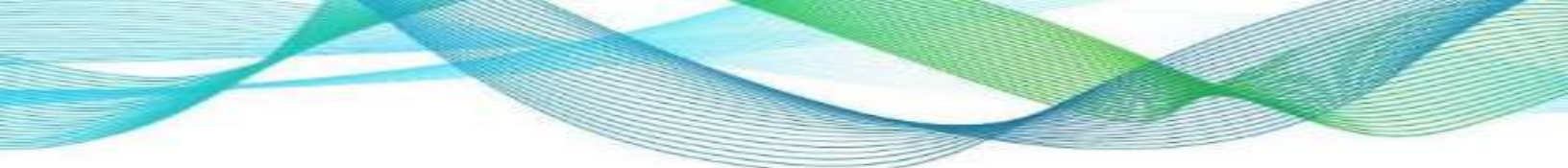
NO	JUDUL SOP
1	Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi
2	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Daerah
5	Penyimpanan/ Pengarsipan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
6	Pengundangan Produk Hukum Daerah
7	Pengumpulan Data dan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Daerah
8	Pencatatan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum
9	Pencatatan/ Penomoran Produk Hukum Daerah
10	Entry Data Peraturan Perundang-Undangan pada Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum
11	Evaluasi Produk Hukum Daerah
12	Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota
13	Penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah
14	Legal Drafting Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama
15	Penyusunan dan Perumusan Renja
16	Penyusunan SOP
17	Penyusunan Data Inventarisasi Permasalahan Perangkat Daerah
18	Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
19	Penyusunan Perwal Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
20	Penyusunan Perwal Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah
21	Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah
22	Evaluasi Peraturan Wali Kota Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah



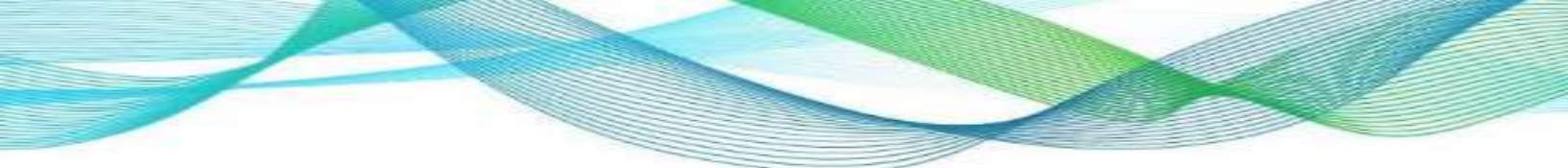
NO	JUDUL SOP
23	Penyusunan Perwal Tentang Penyusunan Analisis Jabatan/Analisis Beban Kerja/Informasi Jabatan/Standar Kompetensi Jabatan
24	Penyusunan Perwal Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
25	Penyusunan Perwal Tentang Penataan Ruang Kantor Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
26	Pelayanan Konsultasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
27	Penyusunan Jawaban Sanggah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
28	Permohonan Pemilihan Penyedia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
29	Pemilihan Penyedia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
30	Pelayanan Konsultasi Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya
31	Penyusunan Jawaban Sanggah Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya
32	Permohonan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya
33	Prosedur Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
34	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
35	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
36	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Jasa Konsultasi Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
37	Fasilitasi Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi
38	Penyelesaian Permasalahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi
39	Seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi
40	Pengkoordinasian Pengendalian Inflasi
41	Monitoring Harga Pasar
42	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Ekonomi
43	Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pengelola Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi
44	Pelaporan Sismonteptra (Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi



NO	JUDUL SOP
	Anggaran) Kota Bekasi
45	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Kota Bekasi
46	Penyusunan Standar Biaya (SBM) Kota Bekasi
47	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan P3BK (Program Partisipatif Berbasis Komunitas)
48	Rekomendasi Kerjasama Antar Daerah
49	Proses Kerjasama Antar Daerah
50	Monitoring Kerjasama Antar Daerah
51	Rekomendasi Kerjasama Dengan Pihak Lain
52	Proses Kerjasama Dengan Pihak Lain
53	Rekomendasi Kerjasama Luar Negeri
54	Kerjasama Luar Negeri
55	Monitoring Kerjasama Luar Negeri
56	Monitoring Kerjasama Dengan Pihak Lain
57	Pelayanan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah
58	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi
59	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'An Tingkat Kota Bekasi
60	Pengiriman dan Pembinaan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
61	Pengelolaan Surat Permohonan Hibah
62	Permusan Kebijakan Tata Cara Pendirian Perguruan Tinggi Di Kota Bekasi
63	Peliputan Kegiatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
64	Penyusunan Kliping Berita
65	Penyampaian Berita Hasil Liputan Kegiatan Pimpinan
66	Penerimaan Tamu Kunjungan Daerah
67	Pengelolaan Media Center/Press Room
68	Penyediaan Cenderamata Kunjungan Daerah
69	Pelaksanaan Liputan Oleh Media
70	Penyelenggaraan Konferensi Pers



NO	JUDUL SOP
71	Penyusunan Kerjasama Advetorial
72	Pelayanan Informasi PPPID Pembantu
73	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi/Call Center
74	Permohonan Kehadiran Walikota/Wakil Walikota Dalam Acara Resmi
75	Pelayanan Audiensi Walikota/Wakil Walikota Dan Sekretaris Daerah
76	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
77	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah
78	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
79	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
80	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD)
81	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
82	Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
83	Pengelolaan Surat Keluar
84	Pengelolaan Surat Keluar Walikota/Wakil Walikota
85	Surat Masuk Walikota/Wakil Walikota
86	Pengelolaan Surat Masuk
87	Permohonan Penandatanganan Perda/Kepwal/Perwal
88	Penjadwalan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota
89	Penerimaan Tamu Wali Kota/Wakil Wali Kota
90	Teknisi Aplikasi Design 3D
91	Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
92	Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
93	Pembuatan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
94	Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
95	Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
96	Pembuatan Karpeg Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah



NO	JUDUL SOP
97	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
98	Pembuatan Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
99	Penyusunan Bahan dan Rencana Anggaran
100	Laporan Data Anggaran Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung
101	Laporan Data Keuangan
102	Penyusunan Bahan dan Kebutuhan Biaya Kegiatan
103	Laporan Data Kebutuhan Anggaran
104	Pembuatan dan Penginputan SPP
105	Pengumpulan Data LHKPN Dan LHKS
106	Penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan
107	Penyusunan SOP
108	Pemeliharaan Rutin Fasilitas Gedung Kantor Di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi
109	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah
110	Pemeliharaan Peralatan Inventaris Lingkup Sekretariat Daerah
111	Pengelolaan Kebersihan di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi
112	Pemeliharaan dan Kebutuhan Barang Lingkup Sekretariat Daerah
113	Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas dan Fasilitas Penunjang Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
114	Penyediaan Barang Ruang Kerja dan Rumah Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
115	Pelayanan Kebutuhan Barang Rumah Tangga Pimpinan
116	Pelaksanaan Penyediaan Tempat, Makan dan Minum, Peralatan Upacara, Rapat Dan Acara Lain Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah
117	Pelayanan Pengadaan Barang Lingkup Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah
118	Pengadaan Barang Lingkup Sekretariat Daerah
119	Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
120	Monitoring Barang Milik Daerah

NO	JUDUL SOP
121	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
122	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
123	Pendataan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
124	Pelaksanaan Analisis Informasi Pasar
125	Penerimaan Barang dari Pemenuhan Kewajiban Pihak Penyedia
126	Pendistribusian Barang ke Perangkat Daerah
127	Pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang
128	Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Barang Milik Daerah

Berdasarkan tabel diatas, Sekretariat Daerah Kota Bekasi memiliki 128Standar Operasional Prosedur (SOP).

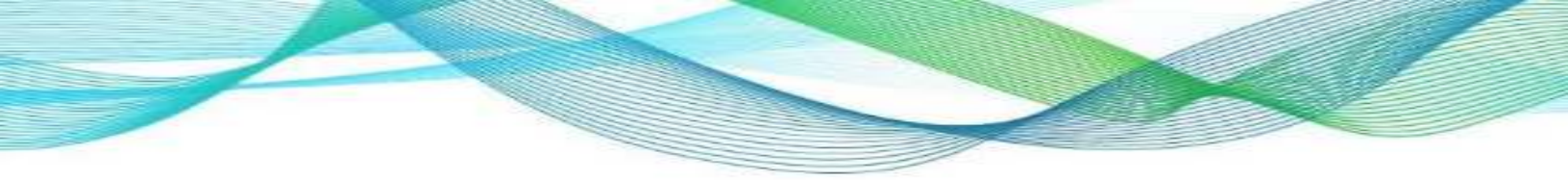
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi memiliki pegawai sebanyak 220 orang PNS dan 172 Non PNS dengan total jumlah 392 orang. Rincian pegawai Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PNS	NON PNS	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	1	0	1
2.	Asisten	3	0	3
3.	Staf Ahli	2	0	2
4.	Bagian Tapem	12	9	21
5.	Bagian Hukum	19	8	27
6.	Bagian Organisasi	14	2	16
7.	Bagian FPBJ	26	15	41
8.	Bagian Perekonomian	11	7	18
9.	Bagian Pembangunan	11	5	16
10.	Bagian Kesos	11	10	21

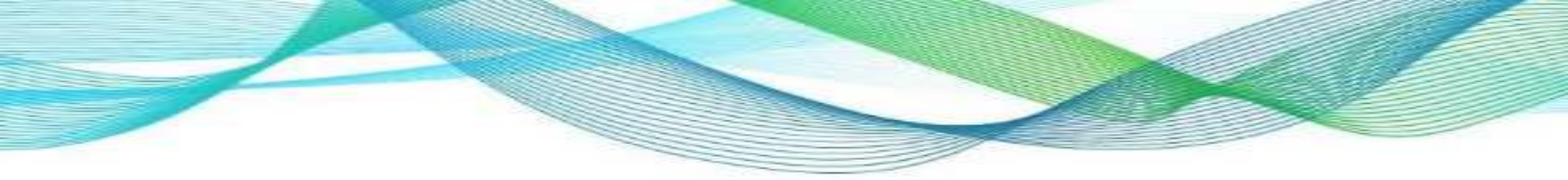


NO	UNIT KERJA	PNS	NON PNS	TOTAL
11.	Bagian Kerjasama	12	7	19
12.	Bagian Umum	32	19	51
13.	Bagian Tata Usaha	44	71	115
14.	Bagian Humas	10	12	22
15.	Bagian Perlengkapan	12	7	19
	JUMLAH	220	172	392

Tabel II.2
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian, Pangkat dan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOL/RUANG	UNIT KERJA															JUMLAH
			SEKDA	ASISTEN	STAF AHLI	BAGIAN TAPEM	BAGIAN HUKUM	BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN FPBJ	BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN PEMBANGUNAN	BAGIAN KESOS	BAGIAN KERJASAMA	BAGIAN UMUM	BAGIAN TATA USAHA	BAGIAN HUMAS	BAGIAN PERLENGKAPAN	
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
4.	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	3	-	-	9
5.	Pembina	IV/a	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	2	1	4	1	2	18
6.	Penata Tk. I	III/d	-	-	-	3	1	3	2	5	1	1	-	3	4	1	2	26
7.	Penata	III/c	-	-	-	2	14	2	6	3	2	5	4	5	7	2	3	55
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	-	3	2	4	3	1	3	2	4	4	6	1	3	36
9.	Penata Muda	III/a	-	-	-	1	1	3	7	-	1	-	1	5	11	1	1	32

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOL/RUANG	UNIT KERJA															JUMLAH
			SEKDA	ASISTEN	STAF AHLI	BAGIAN TAPEM	BAGIAN HUKUM	BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN FPBJ	BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN PEMBANGUNAN	BAGIAN KESOS	BAGIAN KERJASAMA	BAGIAN UMUM	BAGIAN TATA USAHA	BAGIAN HUMAS	BAGIAN PERLENGKAPAN	
10.	Pengatur Tk.I	II/d	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	-	7
11.	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	8	3	2	1	20
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	5
13.	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
14.	Juru. Tk.I	I/d	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15.	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
17.	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PNS		1	3	2	12	19	14	26	11	11	11	12	32	44	10	12	220
	Non PNS		-	-	-	9	8	2	15	7	5	10	7	19	71	12	7	172
	Jumlah		1	3	2	21	27	16	41	18	16	21	19	51	115	22	19	392



Dari tabel II.2 terlihat bahwa PNS dengan status kepegawaian Penata atau golongan ruang /III/c menempati porsi paling besar sebanyak 55 orang atau 25% dari jumlah PNS.

Sedangkan jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SD Sederajat	1	-	10	-	11
2.	SMP Sederajat	-	1	16	-	17
3.	SMA Sederajat	26	8	39	17	90
4.	D3	4	7	6	9	26
5.	D4/S1	61	62	43	32	198
6.	S2	29	21	-	-	50
JUMLAH		121	99	114	58	392

Dari tabel II.3 terlihat bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan D4/S1 dengan jumlah paling besar yakni sebanyak 198 orang atau 50,51% dari total pegawai. Hal ini menandakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah Kota Bekasi sudah lebih baik. Sementara pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan yaitu sebanyak 235 orang atau 59,95% dari total pegawai.

Sedangkan jumlah pegawai menurut usia dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel II.4
Jumlah Pegawai Menurut Usia

No.	Status Kepegawaian	15-25 Tahun	26-35 Tahun	36-45 Tahun	46-55 Tahun	56-65 Tahun	Jumlah
1	PNS	2	46	102	58	12	220
2	Non PNS	25	91	48	8	-	172
Jumlah		27	137	150	66	12	392

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai dengan rentang usia 36-45 tahun menempati porsi paling besar yakni sebanyak 150 orang atau 38,27% dari jumlah pegawai.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat dan penunjang utama yang dipakai untuk terselenggaranya suatu proses pekerjaan.Tanpa adanya sarana dan prasarana, tidak mungkin tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan mudah. Sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel II.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Sekretariat Daerah Kota Bekasi

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
1	AC Sentral	1			1	
2	AC Split	72	48		24	
3	AC Unit	68	14		54	
4	Af Generator Tone Generator	1			1	
5	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2			2	
6	Alat Pemadam Kebakaran	35			35	
7	Alat Pemanas	10			10	
8	Alat Pemanas Prosesing/Water Heater	1			1	
9	Alat Pembersih Lain-lain	37	35		2	
10	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1	1			
11	Alat Penghancur Kertas	28	23		5	
12	Alat Penghancur Kertas Globe	1			1	
13	Alat Rumah Tangga Lain (Tambahan)	7			7	
14	Alat Rumah Tangga Lain-lain	47			47	
15	Audio Amplifier	1	1			
16	Audio Cassete Recorder	2	2			
17	Audio Mbding Portable	1			1	
18	Audio Monitor Passive	2	2			
19	Audio Test Set	1			1	
20	Bangku Tunggu	2	2			
21	Camera + Attachment	16	8		8	
22	Camera Film	5			5	
23	Camera Video	3	1		2	
24	Chairman/Audio Conference	15	15			
25	Coffe Maker	8			8	
26	CPU	4			4	
27	Daun Pintu Alumunium	1			1	
28	Digital Audio Tape Recorder	1			1	
29	Dispenser	20	10		10	
30	Equalizer	1			1	
31	External	2			2	
32	Faximile	4			4	
33	Filling Besi/Metal	87	44		43	
34	Generator	1	1			

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
35	Gerobak Dorong	5		5		
36	Global Positioning System	2	2			
37	Handphone	2	2			
38	Handy Cam	5	2		3	
39	Handy Talky	20			20	
40	Hard Disk	12	3		9	
41	Hum/Cable Compensator	6	2		4	
42	Karpet	1	1			
43	Kursi Besi/Metal	21	21			
44	Kursi Biasa	102	75		27	
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	131	84	6	41	
46	Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota	1	1			
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8	8			
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	4		1	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	36	36			
50	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	74	2		72	
51	Kursi Lipat	279	111		168	
52	Kursi Makan	1	1			
53	Kursi Pimpinan	1	1			
54	Kursi Staff	4	4			
55	Kursi Putar	37	6		31	
56	Kursi Rapat	382	154		228	
57	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	3			3	
58	Kursi Rapat Ruangan Data	5			5	
59	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	8			8	
60	Kursi Tamu	8	2		6	
61	Lap Top	24	9		15	
62	Layar Film	2	1		1	
63	Lemari Arsip	4	4			
64	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	8			8	
65	Lemari Besi	106	69		37	
66	Lemari Buku untuk Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	3			3	
67	Lemari Es	11	6		5	
68	Lemari Kaca	2			2	
69	Lemari Kayu	11	3		8	

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
70	Lemari Makan	2			2	
71	Lemari Pakaian	2	2			
72	Lemari Rias	1			1	
73	Lemari Sorok	2	2			
74	Loudspeaker	3			3	
75	Mainframe	4		3	1	
76	Meja Biro	215	71		144	
77	Meja Kayu/Rotan	15	15			
78	Meja Kerja	5	5			
79	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	65	54		11	
80	Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota	1	1			
81	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2			
82	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3			
83	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	3			
84	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	19	1		18	
85	Meja Komputer	7			7	
86	Meja Lelang	1			1	
87	Meja Makan	4	3		1	
88	Meja Operator	6			6	
89	Meja Podium	6			6	
90	Meja Rapat	21	13		8	
91	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	37			37	
92	Meja Resepsion	4	2		2	
93	Meja Tambahan	8	1		7	
94	Meja Tamu	3	3			
95	Meja Tamu Ruangan Biasa	4			4	
96	Meja Tulis	40			40	
97	Mesin Absensi	3	3			
98	Mesin Cuci	1			1	
99	Mesin Ketik Elektronik	3	1	1	1	
100	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1			1	
101	Mesin Ketik Lain-lain	1			1	
102	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	4			4	
103	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2			2	
104	Mesin Pel	2			2	
105	Mesin Penghisap Debu	5			5	
106	Mesin Potong Rumput	3			3	

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
107	Mic Conference	2			2	
108	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	4			4	
109	Microphone	6	1		5	
110	Microphone Floor Stand	32			32	
111	Microphone Table Stand	1			1	
112	Microphone/Wireless Mic	2			2	
113	Mimbar/Podium	1			1	
114	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	50	38		12	
115	Mixer	1			1	
116	Mobil Dinas Operasional Roda 4	3	3			
117	Monitor	4	2		2	
118	Moeubiler lainnya	13			13	
119	Mouse	71			71	
120	Note Book	25	4		21	
121	Overhead Projektor	6	2		4	
122	P.C Unit	178	94		84	
123	Papan Nama Instansi	1			1	
124	Papan Visual	2			2	
125	Peralatan Computing Lain-lain	1			1	
126	Peralatan Jaringan Lain-lain	3	1		2	
127	Peralatan studio Visual Lain-lain	3	2		1	
128	Personal Komputer	2			2	
129	Pesawat Telephone	1			1	
130	Pick Up	5	5			
131	Pompa Lain-lain	6	1		5	
132	Power Supply	1	1			
133	Printer	188	112		76	
134	Proyektor + Attachment	16	5		11	
135	Rak Besi/Metal	10	4		6	
136	Rak Kayu	1			1	
137	Roller Blind	1	1			
138	Rotary Filling	1			1	
139	Scanner	8	5		3	
140	Screen	2			2	
141	Sedan	2			2	
142	Sepeda Motor	84	58		26	
143	Server	2	2			
144	Slide Projector	1		1		
145	Sofa	161	109		52	
146	Sound System	29	16		13	
147	Stabilizer	1			1	
148	Staion Wagon	1	1			

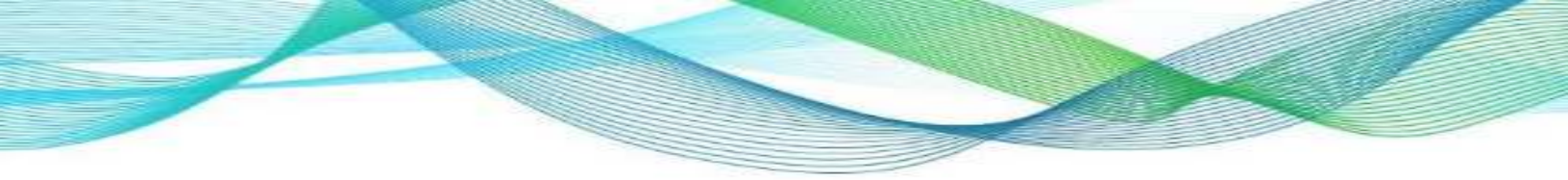
NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
150	Storage Modul Disk	1			1	
151	Tangga Alumunium	1			1	
152	Televisi	15	13		2	
153	Tempat Tidur	1	1			
154	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	6	1		5	
155	Tustel	2			2	
156	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	1			
157	Unit Power Supply	1			1	
158	White Board	2			2	
159	White Board Elektronik	2			2	
160	Wallpaper	1	1			
161	Wireless	2	1		1	
162	Wireless Amplifier	1			1	

2.3 KINERJA PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 terdapat 10 (Sepuluh) sasaran strategis harus dicapai sebagaimana dalam tabel di bawah berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra Sekretariat Daerah
Kota Bekasi
Tahun 2013 – 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan data Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LPPD dan SAKIP) tepat waktu
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik
2.	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, Legislatif dan presiden	Tingkat Fasilitas Pemilu Kepala Daerah Legislatif dan Presiden
3.	Terwujudnya kebijakan daerah yang akuntabel di bidang hukum	Persentase pembentukan produk hukum



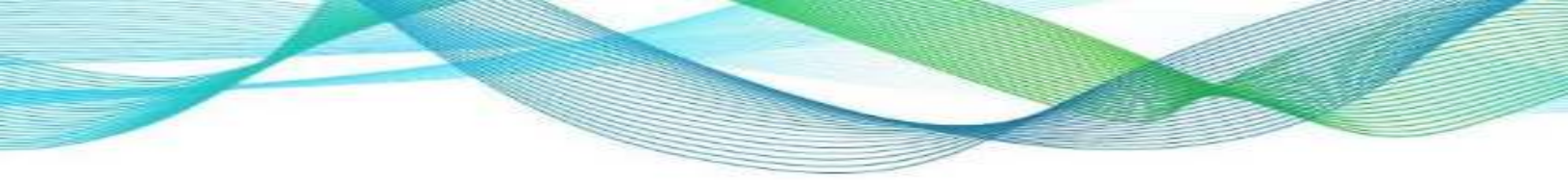
4.	Terwujudnya Kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah	Persentase OPD yang kelembagaannya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah
5.	Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota Bekasi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Kota Bekasi
6.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Jumlah Regulasi yang mengatur Kehidupan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berjalan secara efektif dan efisien	Jumlah Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan
8.	Meningkatnya kualitas layanan pada pimpinan daerah, SKPD dan masyarakat	Persentase pelayanan kehumasan
		IKM pelayanan publik Pemerintah Kota Bekasi
9.	Terciptanya iklim usaha yang kondusif	Persentase naskah Perjanjian Kerjasama yang aktif
10.	Tingkat inflasi Kota Bekasi	Terkendalinya laju inflasi Kota Bekasi

Gambaran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam kurun waktu 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
Kota Bekasi

NO	URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan data Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LPPD dan SAKIP) tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	-	-	-	50%	60%	-	-	-	-	100%					166%
3	Tingkat Fasilitas Pemilu Kepala Daerah Legislatif dan Presiden	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	-	100%
4	Persentase pembentukan produk hukum	100%	100%	100%	80%	100%	86%	100%	104%	70%	84.55%	86%	100%	104%	87.5%	84.55%
5	Persentase OPD yang kelembagaannya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%
6	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Kota Bekasi	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	15.76%	-	-	-	-	15.76%

NO	URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	Jumlah Regulasi yang mengatur Kehidupan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
9	Persentase pelayanan kehumasan	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	170%
10	IKM pelayanan publik Pemerintah Kota Bekasi	-	-	-	77%	78%	-	-	-	75.11%	75.76%	-	-	-	97.5%	97.1%
11	Persentase naskah Perjanjian Kerjasama yang aktif	-	5	5	5	80%	-	21	6	5	81.58%	-	420%	120%	100%	101%
12	Terkendalinya laju inflasi Kota Bekasi	-	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	-	≤0.9%	≤1%	≤1.27%	0.6%	-	111%	100%	78%	166%



Dari tabel diatas umumnya indikator kineja dapat tercapai sesuai dengan yang target, bahkan ada indikator yang capaiannya melampaui target yang telah di tetapkan yaitu :

1. Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik (rasio capaian tahun ke 5 sebesar 160%), hal ini dikarenakan realisasi kinerja yang dicapai melampaui target yang ditetapkan.
2. Persentase pelayanan kehumasan (rasio capaian tahun ke 5 sebesar 170%), hal ini dikarenakan jumlah informasi kehumasan yang dilayani lebih banyak dari target yang ditetapkan.
3. Terkendalnya laju inflasi Kota Bekasi

sedangkan untuk indikator yang tidak mencapai target adalah :

1. Persentase pembentukan produk hukum; hal ini disebabkan karena jumlah raperda yang di sahkan di DPRD tidak sebanyak target yang telah di tetapkan pada tahun perencanaan.
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Kota Bekasi; hal ini disebabkan karena permintaan dari OPD sangat tinggi sementara penyediaan sarana prasarana dibatasi oleh anggaran yang tersedia.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
Kota Bekasi

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
1	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	-	400.000.000	-	-	-	-	188.630.000	-	-	-	-	47,16	-	-	-	-	-
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	200.000.000	-	-	-	-	182.795.000	-	-	-	-	91,40	-	-	-	-	-
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100.000.000	-	-	-	-	99.300.000	-	-	-	-	99,30	-	-	-	-	-25.000.000	-24.825.000
4	Program Perencanaan	200.000.000	-	-	-	-	169.461.000.000	-	-	-	-	84,73	-	-	-	-	-50.000.000	-42.365.250.000

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
	Pembangunan Daerah																	
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2.616.250.000	2.198.336.000	2.294.200.000	1.400.000.000	970.000.000	2.265.636.600	1.858.333.750	2.067.313.233	1.156.884.213	-	86,60	84,53	90,11	82,63	-	-411.562.500	-566.409.150
6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	150.000.000	-	-	-	-	143.694.500	-	-	-	-	95,80	-	-	-	-	-37.500.000	-35.923.625
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.077.500.000	1.200.000.000	-	-	-	1.041.270.000	1.173.870.000	-	-	-	96,64	97,82	-	-	-	-269.375.000	-260.317.500
8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-125.000.000	-

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
	Bencana Alam																	
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.450.000.000	4.603.862.400	6.675.500.000	-	-	2.105.848.500	3.533.996.920	5.740.645.835	-	-	61,04	76,76	86,00	-	-	-862.500.000	-526.462.125
10	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.200.000.000	2.225.904.000	2.073.430.000	2.600.000.000	945.000.000	1.568.151.600	1.693.375.800	1.523.713.800	2.109.308.990	-	71,28	76,08	73,49	81,13	-	-313.750.000	-392.037.900
11	Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	2.495.000.000	2.297.142.400	2.440.279.000	1.803.571.000	1.190.000.000	2.126.403.200	1.856.472.742	1.897.923.331	1.516.432.884	-	85,23	80,82	77,77	84,08	-	-326.250.000	-531.600.800
12	Program Pengadaan,	2.300.000.000	5.534.000.000	9.563.500.000	-	-	2.083.867.800	3.424.887.200	8.050.463.450	-	-	90,60	61,89	84,18	-	-	-575.000.000	-520.966.950

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur																	
13	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	660.000.000	629.343.360	2.730.250.000	4.650.000.000	1.825.000.000	554.024.200	547.481.150	2.369.052.199	3.839.664.422	-	83,94	86,99	86,77	82,57	-	291.250.000	-138.506.050
14	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	96.280.580.555	167.664.276.666	190.087.289.881	-	-	40.002.411.710	91.888.130.470	136.369.794.540	-	-	41,55	54,80	71,74	-	-	-24.070.145.139	-10.000.602.928

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	2.253.000.000	-	-	-	-	1.436.665.952	-	-	-	-	63,77	-	-	-	-	-
16	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	2.059.500.000	7.628.486.976	-	-	-	1.489.472.000	3.343.987.900	-	-	-	72,32	43,84	-	-	-	-514.875.000	-372.368.000
17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah	1.350.000.000	-	-	-	-	1.127.858.650	-	-	-	-	83,55	-	-	-	-	-337.500.000	-281.964.663
18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan	300.000.000	250.000.000	-	-	-	270.277.000	231.246.000	-	-	-	90,09	92,50	-	-	-	-75.000.000	-67.569.250

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
	Kecamatan dalam Pembangunan																	
19	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.200.000.000	3.885.222.400	1.784.322.000	745.000.000	2.020.000.000	982.242.400	2.797.080.592	1.532.715.141	677.326.000	-	81,85	71,99	85,90	90,92	-	205.000.000	-245.560.600
20	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100.000.000	846.976.000	945.000.000	350.000.000	140.000.000	79.014.000	687.862.940	858.539.475	336.330.000	-	79,01	81,21	90,85	96,09	-	10.000.000	-19.753.500
21	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	250.000.000	-	-	-	-	230.412.000	-	-	-	-	92,16	-	-	-	-	-62.500.000	-57.603.000
22	Program Perencanaan	200.000.000	-	-	-	-	169.032.000	-	-	-	-	82,02	-	-	-	-	-50.000.000	-42.258.000

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
	Pembangunan Ekonomi																	
23	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.650.000.000	3.015.000.000	3.499.600.000	3.863.000.000	1.500.000.000	1.757.606.800	2.131.926.230	2.797.019.050	3.409.565.820	-	66,32	70,71	79,92	88,26	-	-287.500.000	-439.401.700
24	Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	600.000.000	685.480.000	572.850.000	700.000.000	580.000.000	530.528.000	566.503.750	308.483.000	457.734.017	-	88,42	82,64	53,85	65,39	-	-5.000.000	-132.632.000
25	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Pemerintah Daerah	1.150.000.000	400.000.000	-	-	-	916.602.200	152.250.000	-	-	-	79,70	38,06	-	-	-	-287.500.000	-229.150.550

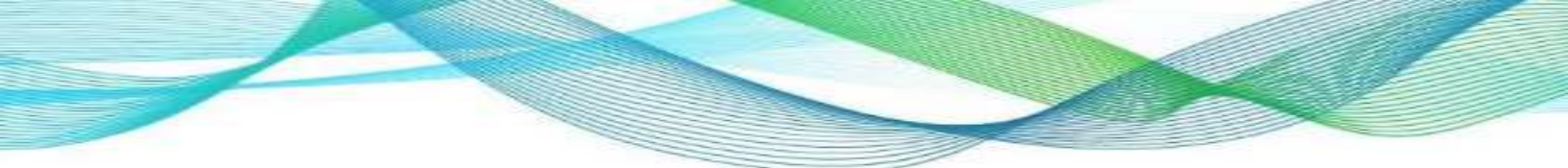
NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
26	Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam Pemilu	700.000.000	-	-	660.700.000	400.000.000	634.380.000	-	-	550.628.672	-	90,63	-	-	83,34	-	-75.000.000	-158.595.000
27	Program Identifikasi Topografi Wilayah	400.000.000	-	-	-	-	315.028.000	-	-	-	-	78,76	-	-	-	-	-100.000.000	-78.757.000
28	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	580.000.000	-	-	-	-	262.031.200	-	-	-	-	45,18	-	-	-	-	-145.000.000	-65.507.800
29	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	2.200.000.000	-	2.643.680.000	2.240.000.000	-	1.728.331.200	-	2.214.264.070	2.131.251.350	-	78,56	-	83,76	95,15	-	-550.000.000	-432.082.800

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
30	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	178.000.000	-	-	-	-	146.996.000	-	-	-	-	82,57	-	-	-	-	-44.500.000	-36.749.000
31	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	-	250.000.000	-	-	-	-	246.505.500	-	-	-	-	98,60	-	-	-	-	-
32	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	690.000.000	923.250.000	33.713.683.580	2.055.000.000	-	499.909.816	668.285.995	33.001.555.946	-	-	72,45	72,38	97,89	-	-513.750.000	-
33	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	-	1.100.000.000	-	-	-	-	964.166.050	-	-	-	-	87,65	-	-	-	-	-
34	Program Penataan dan	-	-	5.489.548.000	3.941.320.000	3.815.000.000	-	-	5.128.188.000	3.672.115.000	-	-	-	93,42	93,17	-	953.750.000	-

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
	Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan																	
35	Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (setda)	-	-	-	5.384.583.930	67.610.000.000	-	-	-	4.396.550.905	-	-	-		81,65	-	16.902.500.000	-
36	Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG URUSAN		125.946.830.555	207.957.030.202	231.722.698.881	62.051.858.510	83.450.000.000	232.091.419.560	119.406.077.762	171.526.401.119	57.255.348.219	-						-10.624.207.639	-58.022.854.890
37	Program Pelayanan Administrasi	18.628.673.500	25.038.565.000	23.613.530.000	25.819.662.000	25.572.425.000	13.304.883.702	18.993.549.776	19.859.900.308	23.229.571.957	-	71,42	75,86	84,10	89,97	-	1.735.937.875	-3.326.220.926

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
	Perkantoran																	
38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.275.000.000	10.701.320.000	10.701.320.000	19.942.760.000	26.893.690.000	3.977.585.775	8.870.040.866	9.282.368.899	17.280.773.343	-	77,23	62,14	86,74	86,65	-	3.154.672.500	-994.396.444
39	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.135.000.000	839.680.000	839.860.000	1.195.000.000	925.000.000	325.291.000	440.966.500	637.110.000	1.017.246.500	-	36,28	38,85	75,88	85,13	-	-52.500.000	-81.322.750
40	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000	400.000.000	270.000.000	520.000.000	550.000.000	40.775.138	381.006.490	266.376.645	470.394.297	-	16,31	95,25	98,66	90,46	-	75.000.000	-10.193.785
41	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	110.000.000	190.000.000	252.440.000	230.500.000	90.000.000	106.027.600	151.490.000	248.299.800	202.093.450	-	96,39	79,73	98,36	87,68	-	-5.000.000	-26.506.900

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Rp	REALISASI
	n Capaian Knerja dan Keuanga n																	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN		34.398.673.500	37.169.565.000	35.677.150.000	47.707.922.000	54.031.115.000	17.754.563.215	28.837.053.632	30.294.055.652	42.200.079.547	-						4.908.110.375	-4.438.640.804
JUMLAH		160.345.504.055	245.126.595.202	267.399.848.881	109.759.780.510	137.481.115.000	249.845.982.775	148.243.131.394	201.820.456.771	99.455.427.766							-5.716.097.264	-62.461.495.694



Berdasarkan Penyesuaian RPJMD tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11.A tahun 2017, dikarenakan adanya penyesuaian program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah, peleburan, pemisahan dan penggabungan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 sehingga Program, Indikator, yang tidak sesuai lagi dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan
13. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
14. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
15. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
17. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Pemerintah Daerah
18. Program Identifikasi Topografi Wilayah
19. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
20. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
22. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya diantaranya :

b. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

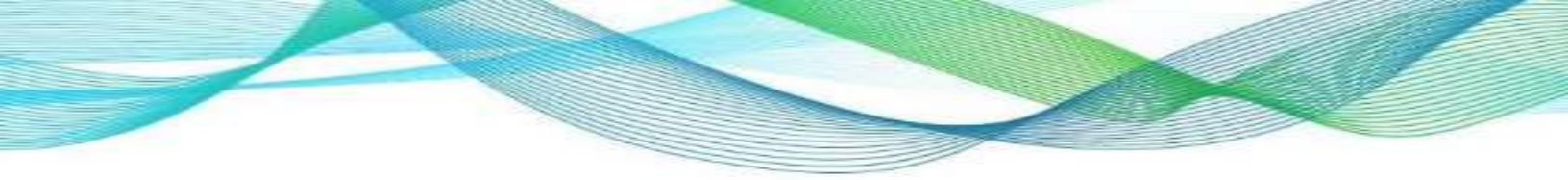
Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

c. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar



pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

- e. Terdapat kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah dan kurang sinkron satu sama lain, dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

2.4.2 Peluang:

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah adalah :

- a. Adanya dukungan positif dari Kepala Daerah, seluruh OPD dan stakeholder dalam pelaksanaan tugas;
- b. Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan;
- d. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi;
- e. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan memungkinkan dukungan positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Sekretariat Daerah dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Sekretariat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Belum optimalnya kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif	• Belum optimalnya analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan • Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan • Belum tersusunnya naskah akademis dan review penataan kelembagaan • Belum tersusunnya roadmap dan evaluasi reformasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum Optimalnya pembinaan akuntabilitas dari perangkat daerah		birokrasi kota bekasi • Belum tersusunnya standar pelayanan publik • Belum optimalnya sinergitas instansi vertikal • Belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat • Belum optimalnya sosialisasi peraturan produk hukum daerah • Belum optimalnya bimbingan teknis legal drafting • Kurangnya kualitas dokumen perencanaan • Belum optimalnya analisa kebijakan pemerintah daerah yang disusun oleh staf ahli • Belum optimalnya pengkajian dan analisa rencana kerja sama • Belum optimalnya penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah. • Kurangnya pengembangan kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa • Belum optimalnya pengendalian kebijakan di bidang perekonomian
		Belum Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	• Kurangnya inventaris kantor dan meubelair aparatur pemerintah daerah • Kurangnya prasarana aparatur pemerintah daerah • Belum optimalnya Sistem Pengendalian Distribusi Barang Milik Daerah
3	Rendahnya kinerja BUMD	Belum optimalnya pembinaan dan pemantauan BUMD	• Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi BUMD • Belum adanya pelatihan manajemen untuk Badan Usaha Milik Daerah • Belum adanya kajian perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah:

“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ikhsan”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kotayang maju dan memadai.
- 3) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
- 5) Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya yang diselenggarakan Sekretariat Daerah maka fungsi dan tugas Sekretariat Daerah terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu “Meningkatkan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahanyang baik”. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH/Wakil KDH terpilih (berkaitan dengan Sekretariat Darah)	Permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahanyang baik	Belum optimalnya perumusan kebijakan dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah Belum optimalnya layanan kedinasan KDH/WKDH Keterbatasan sarana/prasarana dan sumber daya manusia Belum optimalnya pelaksanaan	Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah; Belum semua karyawan paham akan SOP Adanya tuntutan	Adanya uraian Tugas yang jelas; Hubungan yang baik dengan instansi vertikal; Adanya dukungan positif dari Wali Kota dan Wakil Walikota; Tersedianya sistem

No	Misi dan Program KDH/Wakil KDH terpilih (berkaitan dengan Sekretariat Daerah)	Permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Reformasi Birokrasi Belum Optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Belum optimalnya layanan pengadaan barang dan jasa	Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja untuk mewujudkan Sekretariat Daerah yang profesional Adanya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima; Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kebijakan;	Informasi; Adanya keterbukaan informasi publik; Komitmen dari semua bagian untuk melaksanakan uraian tugas dengan sebaik-baiknya; Dukungan serta peran serta masyarakat dalam pembanguna

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Terkait dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah Kota Bekasi secara umum berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Pemerintah Provinsi yang berfokus dan berlokus di wilayah Kota Bekasi disamping penanganan teknis yang dilakukan Perangkat Daerah terkait.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara teknis kinerja Sekretariat Daerah tidak terkait langsung dengan penerapan dokumen RTRW dan dokumen KLHAS Pemerintah Daerah, namun demikian secara substantif berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah sangat berperan dalam menjaga implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang termuat dalam dokumen dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis lanjutan sebagai langkah-langkah efektif dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah yang termuat dalam dokuen RTRW dan KLHS. Tidak terlaksannya dokumen KLHS dan RTRW akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

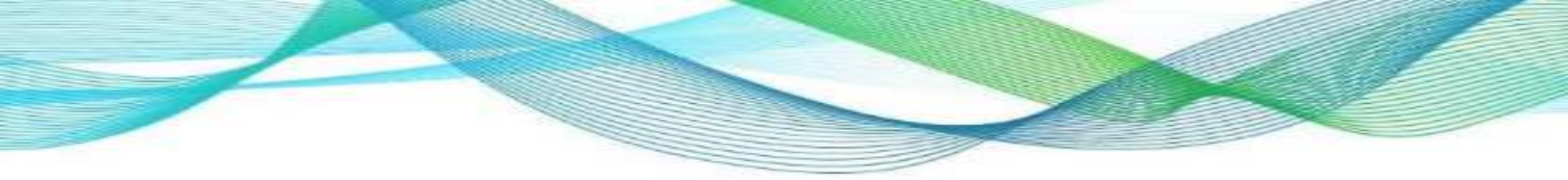
Selain itu Sekretariat Daerah juga berperan dalam melaksanakan pemantauan terhadap implementasi ke dua dokumen dimaksud, yang kemudian digunakan untuk menyusun kebijakan lanjutan terkait upaya supervisi kebijakan RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis daerah yang dapat difokuskan dan dilokuskan menjadi isu strategis Sekretariat Daerah adalah : **penyelenggaraan reformasi birokrasi yang berorientasi pelayanan publik.**

Penyelenggaraan reformasi birokrasi yang berorientasi pelayanan publik masih menjadi masalah dikarenakan :

1. Belum optimalnya penguatan akuntabilitas kinerja
2. Belum optimalnya Sistem Manajemen SDM Aparatur
3. Belum optimalnya penataan organisasi
4. Belum optimalnya penataan tatalaksana
5. Belum optimalnya pelayanan publik
6. Belum optimalnya penataan peraturan perundang-undangan
7. Belum optimalnya penguatan pengawasan
8. Belum berubahnya pola pikir dan budaya kerja aparatur



BAB IV

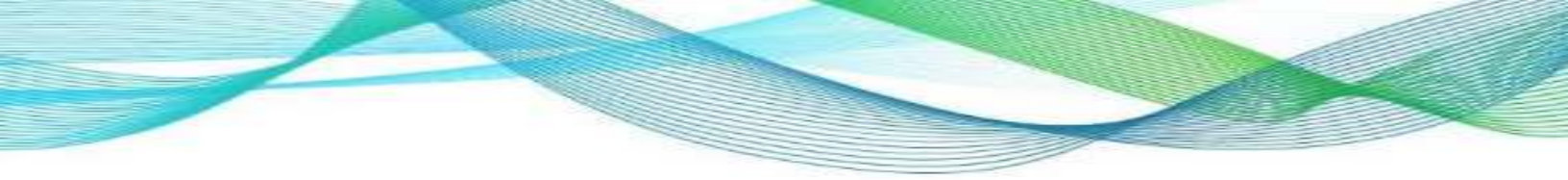
TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacupada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan dan sasaran, dalam RPJMD yang sesuai dengan kedudukan Sekretariat Daerah yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 sebagai unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya dimana dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Bekasi akan melaksanakan misi pembangunan ke-1 yaitu Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 Sekretariat Daerah
 Tahun 2019 – 2023

Nm	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	-	Nilai AKIP Kota	64	65,8	67,6	69,4	72
		Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi.	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Capaian IKK yang meningkat	38%	38%	39%	39%	40%
			Nilai IKM	79	80	81	82	83
		Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" ke atas)	32%	45%	57%	70%	83%
		Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	Persentase BUMD yang sehat	100%	100%	100%	100%	100%



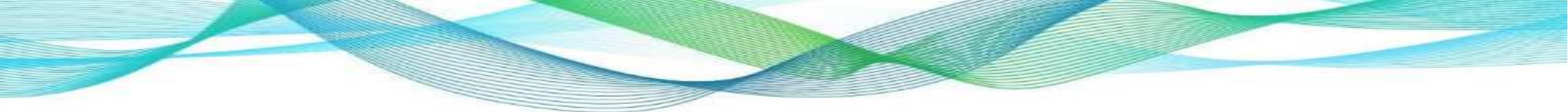
BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program kegiatan.

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

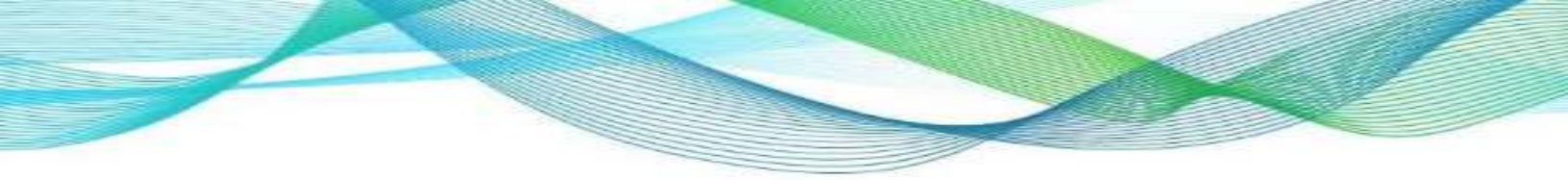
Adapun rumusan strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :



Visi RPJMD	Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ikhsan		
	Meningkatkankapasitas tata kelolapemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	Strategi	ArahKebijakan

Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Meningkatnya profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Meningkatkan Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	1. Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 2. Penataan Batas Daerah Kota Bekasi dan batas antar wilayah kecamatan dan kelurahan 3. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pelayanan informasi publik 4. Temu komunikasi, konsultasi antara pemimpin daerah dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatkan Kualitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 6. Mengoptimalkan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 7. Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 8. Meningkatkan Layanan Penyelesaian Sengketa Hukum 9. Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada Aparatur dan Masyarakat 10. Meningkatkan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 11. Meningkatkan Kebijakan Pengukuran Kinerja ASN 12. Pelaksanaan Evaluasi dan penataan kelembagaan, studi pembentukan kelembagaan, kajian dan bimbingan teknis. 13. Meningkatkan pembinaan pelayanan publik 14. Analisa jabatan, penyusunan standar kompetensi, penyusunan jenis dan formasi jabatan fungsional 15. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa 16. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa 17. Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 18. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi, Pembinaan Qori/Qoriah dan pengiriman Qori/Qoriah ke MTQ Tingkat Provinsi 19. Pengelolaan Masjid Agung 20. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar Keagamaan 21. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 22. Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan 23. Lomba kinerja kecamatan/kelurahan 24. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
---	---	--	---

	Meningkatnya Pembinaan Akuntabilitas dari perangkat daerah		25. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan dalam Upacara dan Seremoni-Seremoni yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi 26. Meningkatkan Kualitas Penatalaksanaan Surat Dinas Pemerintah Kota Bekasi 27. Meningkatkan Kualitas Kerjasama Daerah (Penyusunan Naskah Kerjasama dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama) 28. Meningkatkan implementasi kerjasama 29. Meningkatkan koordinasi 30. Meningkatkan dan mengendalikan kualitas kebijakan ekonomi 31. Mengkoordinasikan arah kebijakan ekonomi kepada unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) 32. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi tingkat kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	1. Pengadaan inventaris kantor dan meubelair aparatur pemerintah daerah 2. Pengadaan prasarana aparatur pemerintah daerah 3. Mengembangkan Sistem Pengendalian Distribusi Barang Milik Daerah
	Meningkatnya Pembinaan dan Pemantauan BUMD	Meningkatkan Pembinaan dan Pemantauan BUMD	1. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap BUMD 2. Seleksi Direksi atau Dewan Pengawas secara independen 3. Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi 4. Audit BUMD Kota Bekasi 5. Pengendalian Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi



Bab VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan rencana program, kegiatan, serta pendanaan.

Adapun rumusan Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaa n Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%		100		100		100		100		100		100		
		Persentase Capaian IKK yang meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	%		100		100		100		100		100		100		
		Nilai IKM		Persentase ketersediaa n Gedung pemerintah an dalam kondisi baik	%		100		100		100		100		100		100		
				Penataan Selasar Penghubung Gedung 10 Lantai ke Gedung Sekretariat Daerah Kota Bekasi	Sarana Penghubung dari Gedung 10 Lantai ke Gedung Sekretariat Daerah Kota Bekasi	m2		250	200.000.000	250	1.000.000.000	-	-	-	-	-	500	1.200.000.000	BAG. UMUM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pemasangan Peredam Suara Ruang H.Nonon Sonthanie	Peredam Suara di Ruang H. Nonon Sonthanie	m2		280	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	280	500.000.000	BAG. UMUM
			Lanjutan Pemasangan Lampu Hias	Lampu Hias	Titik		-	-	20	200.000.000	20	200.000.000	-	-	-	-	40	400.000.000	BAG. UMUM
			Pemasangan Palang Pintu Parkir otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi	palang pintu parkir otomatis kendaraan roda 4 dan/ atau lebih berikut pemasangan cctv dan palang pintu parkir otomatis kendaraan roda2 berikut pemasangan cctv	Lokasi		-	-	2	300.000.000	-	-	-	-	-	-	2	300.000.000	BAG. UMUM
			Penyediaan Tiang Umbul-umbul, Umbul-umbul, Vitrase, dan Tiang Bendera	Jumlah Tiang Umbul-umbul dan Umbul-umbul	Tiang		250	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	250	300.000.000	BAG. UMUM
				Vitrased	m		500		-	-	-	-	-	-	-	-	500		
				Jumlah Tiang Bendera	Tiang		2		-	-	-	-	-	-	-	-	2		
			Pemasangan Karpet dan	Karpet dan Underlayer	m2		-	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-			BAG. UMUM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Underlayer Ruang H.Nonon Sonthanie	Ruang H.Nonon Sonthanie															
			Pemasangan Karpet dan Underlayer Gedung Balai Patriot	Karpet dan Underlayer Gedung Balai Patriot	m2		-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-			BAG. UMUM	
			Pengembangan Sistem Pengendalian Distribusi Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan BMD	Orang		140	350.000.000	140	350.000.000	140	350.000.000	140	350.000.000	140	350.000.000	700	1.750.000.000	BAG. PERLENGKAA N
				Monitoring dan Evaluasi Pengendalia n BMD	Kali		8		8		8		8		8		40		
				Aplikasi Pengendalia n BMD	Aplikasi		1		-		-		-		-		1		
				Sarana dan Prasarana Pengendalia n BMD	Jenis		4		1		1		1		1		8		
			Penyusunan Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	Buku dan CD Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)	Buku dan CD		200	175.000.000	200	175.000.000	200	175.000.000	200	175.000.000	200	175.000.000	1.000	875.000.000	BAG. PERLENGKAA N
				Aplikasi Standar Harga Tertinggi Barang	Aplikasi		1		1		1		1		1		5		
			Pengadaan Sarana Mobilitas	Kendaraan roda 4 dan	Kendaraa n Roda 2	94	94	5.000.000.000	94	2.000.000.000	94	1.000.000.000	94	1.000.000.000	94	1.000.000.000	470	10.000.000.000	BAG. PERLENGKAP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				roda 2 untuk pekerja sosial														AN	
			Pengadaan Barang Inventaris Kantor	Barang Inventaris Kantor	Lemari Arsip Pintu Kaca Sliding		-	4.000.000.000	55	3.000.000.000	55	2.500.000.000	24	2.500.000.000	22	2.500.000.000	156	14.500.000.000	BAG. PERLENGKAA N BAG. PERLENGKAA N
				Lemari Arsip Pintu Ayun		-		55		55		24		24		158			
				Filling Kabinet 4 laci		-		55		55		25		25		160			
				Rotary Filling Kabinet				8		8		82		82		180			
				Mesin Absensi				3		3		3				9			
				Komputer All in One				175		175		100		100		550			
				Laptop				40		40		20		20		120			
				Printer Laser Jet				70		70		50		50		240			
				Printer All in One Scan & Copy				15		15		15		20		65			
				Printer Warna				115		115		115		100		445			
			Pengadaan Inventaris Kantor (Setda)	Barang Inventaris Kantor (setda)	Printer inkjet all in one scan dan copy		43	500.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	43	10.000.000.000	BAG. PERLENGKAA N
				Printer laser jet		41		-		-		-		-		41			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Penghanc ur Kertas		-		9		-		-		-		9		
					Digital Voice Recorder		-		4		-		-		-		4		
					HD Eksternal		-		15		-		-		-		15		
					Laptop		-		20		-		-		-		20		
					AC		-		22		-		-		-		22		
					Dispenser		-		3		-		-		-		3		
					Kulkas		-		2		-		-		-		2		
					TV LCD		-		4		-		-		-		4		
					Handy Talky		-		6		-		-		-		6		
					Backup plus Slim		-		4		-		-		-		4		
					Tripod		-		2		-		-		-		2		
					Camcorde r		-		2		-		-		-		2		
					Battery Camera		-		2		-		-		-		2		
					Monitor		-		1		-		-		-		1		
					Mouse		-		15		-		-		-		15		
					Keyboard		-		8		-		-		-		8		
					Flash Speedlite		-		3		-		-		-		3		
					Motor		-		4		-		-		-		4		
					Pointer		-		2		-		-		-		2		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
							2018	2019		2020		2021		2022		2023						
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Flashdisk		-		12		-		-		-		12					
					Infocus		-		2		-		-		2							
					MMC		-		6		-		-		6							
			Pengadaan Meubelair (Setda)	Meubelair (Setda)	Set Meja Kursi		117	300.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		100.000.000	117	1.000.000.000		BAG. PERLENGKAA N		
			Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Meningkatnya Profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	Program kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif	Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%		100		100		100		100		100			100	Bagian Organisasi
					Persentase Capaian IKK yang meningkat		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan		70		70		70		70		70					
	Nilai IKM																					
Meningkatnya pembinaan akuntabilitas dari perangkat daerah	Persentase peningkatan kualitas AKIP OPD (Kategori “B”keatas)	Persentase capaian IKK 2,1 dan 2,3 LPPD yang naik	%	45 indikator meningkat (34,62 %)	25			25		25		25		25		25						
		Persentase OPD yang menerapkan	%	30,43	52,17			65,22		78,26		91,30		100		100						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				SAKIP berkualitas															
				Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	%		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah	%		90		93		95		97		100		100		
				Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%		100		100		100		100		100		100		
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	%		35		40		70		75		85		35		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya	%		100		100		100		100		100		100		
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%		≥70		≥70		≥70		≥70		≥70		≥70		
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	Jumlah Kebijakan		10		10		10		10		10		50		
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%		20		40		60		80		100		100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Jumlah Informasi		9.300		9.300		9.300		9.300		9.300		46.500		
				Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai ketentuan	%		≥70		≥80		≥80		≥80		≥80		≥80		
			Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Peserta		140	250.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	540	650.000.000	BAG. ORGANISASI	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terlaksananya FGD Evaluasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Kelas Jabatan	Peserta		140		-		-		-		-		140		
			Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Peserta Workshop Standar Kompetensi Jabatan	Peserta		140	-									140	300.000.000	BAG. ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Workshop Standar Kompetensi Jabatan	Perangkat Daerah				47	100.000.000	47	100.000.000	-	-	47	100.000.000	47		
			Penyusunan Naskah Akademis dan Review Penataan Kelembagaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Orang		120	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120	125.000.000	BAG. ORGANISASI
				Dokumen Naskah Akademis	Dokumen		1		-		-		-		-		1		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Laporan Tupoksi dan Penataan Kelembagaan	Laporan		15		-		-		-		-		15		
			Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Orang		-	-	120	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	120	400.000.000	BAG. ORGANISASI
				Dokumen Naskah Akademis	Dokumen		-		1		-		-		1		2		
				Laporan Tupoksi dan Penataan Kelembagaan	Laporan		-		47		47		47		47		47		
			Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi	Jumlah peserta Workshop Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi	Peserta		140	300.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	140	700.000.000	BAG. ORGANISASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah Peserta FGD Evaluasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi	Peserta		40		100		-		-		-		140		
				Jumlah Peserta FGD Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi	Peserta		40		-		47		47		47		47		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Dokumen		1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	BAG. ORGANISASI	
			Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen		-	-	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	4	560.000.000	BAG. ORGANISASI	
			Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Peserta		-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	BAG. ORGANISASI	
			Penyusunan dan Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2018	Kelurahan		56	150.000.000	56	200.000.000	56	200.000.000	56	250.000.000	56	250.000.000	56		BAG. TATA PEMRINTAHAN	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			(PRODESKEL)	Jumlah Dokumen Profil Desa dan Kelurahan se-Kota Bekasi	Dokumen		56		56		56		56		56		56		
			Sinergitas instansi Vertikal	Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal	Kali		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000	BAG. TATA PEMERINTAHAN
				Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal	Laporan		1		1		1		1		1		5		
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun	Dokumen SAKIP	Dokumen		1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	2.000.000.000	BAG. TATA PEMERINTAHAN
				Dokumen LAKIP	Dokumen		1		1		1		1		1		5		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjwab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2018	Dokumen Evaluasi Capaian Target Fisik dan Anggaran	Dokumen		4		4		4		4		4		20		
				Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	Dokumen		4		4		4		4		4		20		
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2018	Jumlah kegiatan Pendamping an pra EKPPD tahun 2019	Kegiatan		1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	2.000.000.000	BAG. TATA PEMERINTAH AN
				Dokumen LPPD Kota Bekasi Tahun 2018 dan Capaian IKK LPPD Kota Bekasi Tahun 2018	Dokumen		1		1		1		1		1		5		
				Jumlah Peserta Sosialisasi LPPD tahun 2019	Orang		150		150		150		150		150		150		
			Lomba Kinerja kecamatan dan Kelurahan Tahun 2019	Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi	Dokumen		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	BAG. TATA PEMERINTAH AN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah Event Lomba Kinerja Kelurahan se-Kota Bekasi	Event		1		1		1		1		1		5		
				Jumlah Kecamatan yang dibina dalam hal Kinerja Kecamatan	Kecamata n		12		12		12		12		12		12		
			Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Event Lomba LPM Berprestasi Tk. Kota Bekasi	Event		1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	5	100.000.0 00	BAG. TATA PEMERINTAH AN
				Jumlah peserta Pembinaan SDM LPM	Orang		75	75	75	75	75	75	75	75					
			Penyelenggaraa n BBGRM Kota Bekasi	Jumlah Event Pencana n dan Penutupan BBGRM Tk. Kota dan Tk. Provinsi	Event		2	200.000.0 00	2	250.000.0 00	2	250.000.0 00	2	300.000.0 00	2	300.000.0 00	10	300.000.0 00	BAG. TATA PEMERINTAH AN
				Jumlah Event Lomba BBGRM Tk. Kota Bekasi	Event		1		1		1		1		1		5		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2018	2019		2020		2021		2022		2023				
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah peserta Sosialisasi BBGRM Kota Bekasi	Orang		540		540		540		540		540		540		BAG. TATA PEMERINTAHAN	
			Monitoring dan Evaluasi K3	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi K3	Kecamatan		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		5
				Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan K3	Laporan		1		1		1		1		1		5			
			Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang dikelola dan terdokumentasikan serta Pengelolaan website jdih.bekasikota.go.id;	LD Perda		19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	95	250.000.000	BAG. HUKUM	
					BD Perwal		80		80		80		80		80		400			
					Keputusan		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		5.000			
					Tahun		1		1		1		1		1		5			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjab wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sosialisasi Peraturan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Daerah	Orang		300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1.500	500.000.000	BAG. HUKUM
				Jumlah Perda yang disosialisasikan	Perda		3		3		3		3		3		15		
			Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	Cetak Peraturan Daerah Kota Bekasi	LD Perda yang dicetak		1.900	90.000.000	1.900	100.000.000	1.900	100.000.000	1.900	100.000.000	1.900	100.000.000	9.500	490.000.000	BAG. HUKUM
				Penyelenggaraa n Program Pembentukan Peraturan Daerah	Perda yang sudah di bahas	Perda		15	300.000.000	16	350.000.000	17	400.000.000	18	450.000.000	19	450.000.000	85	2.000.000.000
			Raperda yang sudah di asistensi		Raperda		10		11		12		13		14		60		
			Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota	Rancangan Peraturan Walikota yang di harmonisasi	Raperwal		50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	60	200.000.000	260	800.000.000	BAG. HUKUM
			Evaluasi Produk Hukum Tahun 2010-2015	Dokumen Evaluasi Produk Hukum	Dokumen		1	126.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	9	326.000.000	BAG. HUKUM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjab wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyuluhan Hukum	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	Orang		400	100.000.000	400	100.000.000	400	100.000.000	400	100.000.000	400	100.000.000	2.000	500.000.000	BAG. HUKUM
			Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	Orang		60	150.000.000			60	150.000.000			60	150.000.000	180	450.000.000	BAG. HUKUM
			Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional	Jumlah Legal Opinion	LO		6	400.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	30	1.600.000.000	BAG. HUKUM
				Jumlah peserta Bimtek Penanganan Perkara	Orang		100									100			
			Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan	Jumlah Perkara Perdata, TUN dan diluar Pengadilan yang diselesaikan	Perkara Perdata		6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	34	850.000.000	BAG. HUKUM
					Perkara TUN		6		8		8		8		38				
					Perkara diluar pengadilan		15		15		15		15		75				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen		4	300.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.150.000.000	BAG. TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekda/ASDA dengan Pejabat Pemerintah Daerah	Kali Rapat		90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	450	1.500.000.000	BAG. TATA USAHA
			Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Masyarakat/ Organisasi Sosial	Kali Dialog/Audiensi		50	1.175.000.000	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	250	9.175.000.000	BAG. TATA USAHA
				Jumlah Cenderamata	Cinderamata		16		16		16		16		16		80		
				Jumlah Karangan Bunga	Karangan Bunga		894		984		984		984		984		4.830		
				Jumlah Sarung	Sarung		200		200		200		200		200		1.000		
			Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota	Jumlah Analisa Kebijakan	Analisa		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000	BAG. TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			dan Wakil Wali Kota	Pemerintah Daerah yang disusun oleh Staf Ahli	Kali Kunjungan Kerja		2		2		2		2		2		10		
			Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Piala Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Piala Tetap		64	200.000.000	64	200.000.000	64	200.000.000	64	200.000.000	64	200.000.000	320	1.000.000.000	BAG. TATA USAHA
				Jumlah Piala kejuaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Piala Juara 1,2 dan 3		23		23		23		23		23		115		
			Penyelenggara n Keprotokolan	Jenis Sarana dan Prasarana Keprotokolan	Jenis		8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	1.500.000.000	BAG. TATA USAHA
			Penyelenggara n KOMDA HIV/AIDS	Dokumen Pelaksanaan Sekretariat KPA Kota Bekasi	Dokumen		12	150.000.000	12	350.000.000	12	450.000.000	12	550.000.000	12	650.000.000	60	2.150.000.000	BAG. KESOS
				Peringatan Hari AIDS Se Dunia	Kegiatan		1		1		1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjwab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengelolaan Masjid Agung AL Barkah Pemerintah Kota Bekasi	Pengelolaan Operasional Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi	Kegiatan		1	1.280.000.000	1	1.350.000.000	1	1.400.000.000	1	1.450.000.000	1	1.500.000.000	5	6.980.000.000	BAG. KESOS
				Jenis Peralatan Pembersih Masjid	Jenis		21		21		21		21		21		105		
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kegiatan		2		2		2		2		2		10		
				Luas Taman yang Dipelihara	m2		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			Penyelenggara n MTQ Tingkat Kota Bekasi	Lomba MTQ Tingkat Kota Bekasi untuk mendapatkan Qori /Qoriah Kota Bekasi yang berkualitas	Kegiatan		1	800.000.000	1	850.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	950.000.000	5	4.400.000.000	BAG. KESOS
				Pembinaan Peserta Qori/Qoriah	Kegiatan		1		1		1		1		1		5		
			Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam	Frekuensi Tarwih Keliling di Kota Bekasi	Kali Tarawih		13	600.000.000	13	600.000.000	13	600.000.000	13	600.000.000	13	600.000.000	65	3.000.000.000	BAG. KESOS

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pemerintah Kota Bekasi	Frekuensi Jum'at Keliling di Kota Bekasi	Kali Jum'at Keliling		12		12		12		12		12		60		
			Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi	Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Bekasi	Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi		9	1.100.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	5.100.000.000	BAG. KESOS
			Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi	Jumlah Pelaksanaan Hari Besar keagamaan di Kota Bekasi	Hari Besar Islam		7	800.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000	7	800.000.000	7	4.000.000.000	BAG. KESOS
				Lomba Pawai Ta'aruf	event		1									1			
			Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Keikutsertaan Kota Bekasi dalam event MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Kegiatan		1	800.000.000	1	950.000.000	1	950.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	4.700.000.000	BAG. KESOS

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Frekuensi Pembinaan Peserta Kafilah (Qori/Qoriah)	Kali		1		1		1		1		1		5		
			Penyelenggara n Pelayanan Haji Kota Bekasi	Jumlah Kloter Calon Jemaáh Haji yang dilayani dan difasilitasi	Kloter		10	900.000.000	10	900.000.000	10	900.000.000	10	900.000.000	10	900.000.000	50	4.500.000.000	BAG. KESOS
				Jumlah Jama'ah Haji yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Tata Laksana Pelayanan Haji	Jama'ah Haji		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		14.000		
			Penunjang Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggara n Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4)	Kajian dan Rekomendas i Kepada Walikota Tentang Kebijakan pada Perangkat Daerah	Kajian		5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	25	8.500.000.000	BAG. PEMBANGUN AN
			Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang		110	250.000.000	110	250.000.000	110	250.000.000	110	250.000.000	110	250.000.000	110	1.250.000.000	BAG. PEMBANGUN AN
				Jumlah Monitoring	Kali		12		12		12		12		12		60		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Komunitas (P3BK) Tahun 2018	Laporan Kegiatan P3BK	Laporan		1		1		1		1		1		5		
			Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan SISMONTPEPA Kota Bekasi	Laporan Sismomtepra Kota Bekasi	Laporan		1	75.000.000									1	75.000.000	BAG. PEMBANGUNAN
			Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020	Buku SBM (Standar Biaya Masukan) Kota Bekasi Tahun 2020	Buku		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.000.000.000	BAG. PEMBANGUNAN
			Penyelenggara n Kegiatan TMMD	Event Pembukaan dan Penutupan TMMD	Event		2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000	BAG. PEMBANGUNAN
				Jumlah Penyuluhan Masyarakat	Kali		4		4		4		4		4		20		BAG. PEMBANGUNAN
				Jenis Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan TMMD	Jenis		3		3		3		3		3		15		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengendalian Pembangunan	Laporan Pengendalian Pembangunan	Laporan				1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	1.000.000.000	BAG. PEMBANGUNAN
			Pengendalian Inflasi Daerah	Tim Pengendalian Inflasi Di Kota Bekasi	Orang		40	200.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	300.000.000	40	400.000.000	200	1.400.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
				Jumlah Peserta Sosialisasi Mengenai Pengendalian Inflasi Daerah Pada Perekonomian Kota Bekasi	Orang		50		50		50		50		50		300		
				Kajian Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota Bekasi	Kajian		1		1								2		
			Penelahaan dan Penyusunan Kerja Sama Daerah	Frekuensi rapat ekspose dan pembahasan naskah kerja sama daerah	Kali		40	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	40	250.000.000	BAG. KERJASAMA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Frekuensi Pendampingan oleh tim Kejaksanaan	Kali		3		-		-		-		-		3		BAG. KERJASAMA
				Lelang Investasi	Kali		4		-		-		-		4				
			Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI	Keikutsertaan dalam event Rakerkomwil, Rakernas, dan Pameran City Expo	Event		3	400.000.000	4	550.000.000	4	600.000.000	4	650.000.000	4	700.000.000	19	2.900.000.000	
				Jumlah Souvenir	Buah		100	100	100	100	100	500							
				Stand Pameran City Expo	Stand		1	1	1	1	1	5							
				Jumlah Pakaian adat daerah	Buah		33	40	45	50	55	233							
			Website Kerja Sama Daerah	Website Kerja Sama	Website		1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000	BAG. KERJASAMA	
			Database Kerja Sama Daerah	Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana database kerja sama	Jenis		5	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5	300.000.000	BAG. KERJASAMA	
				Jumlah Peserta Bimtek penginputan	Peserta		50	-	-	-	-	-	50						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				database															
				Jumlah Sarana dan Prasarana Database Kerja Sama	Buah		4		-		-		-		-		4		
			Evaluasi Perjanjian Kerja Sama	Frekuensi Rapat evaluasi perjanjian kerja sama	Kali		48	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	48	250.000.000	BAG. KERJASAMA
				Frekuensi Monitoring perjanjian kerja sama	Kali		48		-		-		-		-		48		
			Pengkajian dan analisa Rencana Kerja Sama	Frekuensi Rapat Ekspose Pemrakarsa Kerja Sama	Kali		-	-	35	100.000.000	40	110.000.000	45	120.000.000	20	130.000.000	170	460.000.000	BAG. KERJASAMA
				Frekuensi Pendampingan dari Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Pemprov Jabar	Kali		-		6		8		10		12		36		
			Penyusunan Naskah Kerja Sama	Frekuensi Rapat Penyusunan Draft Kerja Sama	Kali		-	-	40	120.000.000	45	130.000.000	50	140.000.000	55	150.000.000	190	540.000.000	BAG. KERJASAMA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjwa wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Frekuensi Pendampingan dengan Tim Kejaksanaan	Kali		-		3		3		3		3		12		
				Frekuensi Lelang Investasi	Kali		-		4		4		4		4		16		
			Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama	Frekuensi Rapat evaluasi perjanjian kerja sama	Kali		-	-	55	100.000.000	62	110.000.000	66	120.000.000	70	130.000.000	253	460.000.000	BAG. KERJASAMA
				Frekuensi Monitoring perjanjian kerja sama	Kali		-		55		62		66		70		253		
			Pemeliharaan Database Kerja Sama	Jasa Pemeliharaan Database	Kali		-	-	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	4	245.000.000	BAG. KERJASAMA
			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penyusunan Naskah Kerja Sama	Jumlah Peserta Bimtek penyusunan Naskah Kerja Sama	Orang		-	-	50	200.000.000	50	220.000.000	50	240.000.000	50	260.000.000	20	920.000.000	BAG. KERJASAMA
			Pembinaan Kehumasan	Jumlah Peserta pembinaan kehumasan	Orang		300	200.000.000	300	200.000.000	300	200.000.000	300	200.000.000	300	200.000.000	1.500	1.000.000.000	BAG. HUMAS
			Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah event Lomba Jumalistik	event		2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.250.000.000	BAG. HUMAS

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
			forum pers	Jumlah Peserta Uji Kompetensi Wartawan	Orang		50		50		50		50		50		250		
			Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah kalender gantung	eksemplar kalender gantung		5.000	250.000.000	5.000	250.000.000	5.000	250.000.000	5.000	250.000.000	5.000	250.000.000	25.000	1.250.000.000	BAG. HUMAS
				Jumlah Kalender meja	eksemplar kalender meja		2.026		2.026		2.026		2.026		2.026		10.130		
			Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembuatan Road Map Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan		1	350.000.000	1	350.000.000	-	-	1	350.000.000	1	350.000.000	4	1.400.000.000	BAG. HUMAS
				Jumlah Kegiatan yang didokumenta sikan	Kegiatan		720		720		-		720		720		2.880		
				Cetak Foto	Buah		4		4		-		4		4		16		
			Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Frekuensi informasi yang disebarluaskan lewat media radio	Siar		591	2.500.000.000	591	3.500.000.000	591	3.500.000.000	591	3.500.000.000	591	3.500.000.000	2.955	16.500.000.000	BAG. HUMAS
				Jumlah Media massa yang bekerjasama dengan	Media		5		5		5		5		5		25		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pemerintah Kota Bekasi														BAG. HUMAS	
				Jumlah informasi yang disebarluaskan di media antar luar ruang	Buah		97		97		97		97		97		485		
				Frekuensipe nayangan informasi di media televisi	Tayang		0		5		5		5		5		27		
			Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Kunjungan kerja ke Pemda Kota Bekasi	Kali		65	300.000.000	65	300.000.000	65	300.000.000	65	300.000.000	65	300.000.000	325		1.500.000.000
				Jumlah Cinderamata (Souvenir, Maskot Kota Bekasi, Kain Batik khas Kota Bekasi)	Buah		455		455		455		455		455		2.275		
				Frekuensi Dialog Audiensi Press Conference	Kali		12		12		12		12		12		60		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2018	2019		2020		2021		2022		2023					
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi/Pembinaan PPID Pembantu (Sekretaris dan Admin)	Kegiatan		5	200.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	17	1.300.000.000	BAG. HUMAS		
				Buku laporan informasi tahunan	Buku		1		1		1		1		1		5				
			Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	Frekuensi Pengiriman Pokja Pemilihan Mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa	Kali		36	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36		200.000.000	BAG. FPBJ
				Jumlah Peserta Bimtek/Training Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	Orang		60		-		-		-		-		60				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti bimtek/sosialisasi/rakor/pelatihan/seminar/training	Orang		-	-	189	670.700.000	280	680.800.000	179	775.200.000	189	778.700.000	837	2.905.400.000	BAG. FPBJ
			Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah aplikasi Pengadaan Barang/Jasa yang tersedia	Aplikasi		2	250.000.000	4	350.000.000	4	450.000.000	4	460.000.000	4	470.000.000	18	1.980.000.000	BAG. FPBJ
			Pengembangan Organisasi UKPBJ melalui Program Sistring	Jumlah Peserta Sosialisasi Stakeholder Pencapaian CoE	Orang		50	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100.000.000	BAG. FPBJ
			Pendampingan dan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015	Sertifikasi ISO 9001:2015	Sertifikasi		1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	BAG. FPBJ
				Laporan Audit	Laporan		1		-		-		-		-		1		
			Surveillance (Audit Pengawasan)	Laporan Audit	Laporan		1	100.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	300.000.000	3	120.000.000	13	730.000.000	BAG. FPBJ

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			ISO 9001:2015, ISO 27001dan Standarisasi ISO	Sertifikasi ISO9001:201 5,ISO 27001dan Standarisasi ISO	Sertifikasi		-		-		-		3		-		3		
			Penyelenggaraa n Konsultasi dan Advokasi Pengadaan	Jumlah konsultasi yang diselenggara kan	Kali		-	-	10	250.000.0 00	10	260.000.0 00	10	265.000.0 00	10	270.000.0 00	40	1.045.000. 000	BAG. FPBJ
				Pendamping an Advokasi	Paket		-		1		1		1		1		4		
			Pengelolaan LPSE	Pemeliharaaa n Generator Listrik	unit		1	650.000.0 00	1	980.000.0 00	1	980.000.0 00	1	980.000.0 00	1	980.000.0 00	1	4.570.000. 000	BAG. FPBJ
				Pemeliharaaa n DRC Server LPSE Kota Bekasi	Bulan		12		12		12		12		12		60		
				Jumlah Pembuktian Kualifikasi Calon Penyedia	OK		-		7x20 kali pembuk tian = 140		7x20 kali pembuk tian = 140		7x20 kali pembuk tian = 140		7x20 kali pembuk tian = 140		560		
			Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengendalia n Kebijakan di Bidang Perekonomia n	Laporan		-	-	3	100.000.0 00	4	100.000.0 00	4	100.000.0 00	5	100.000.0 00	15	400.000.0 00	BAG. PEREKONOMI AN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan		-	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
			Koordinasi Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif di Kota Bekasi	Persentase Koordinasi Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif di Kota Bekasi	%		-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan BUMD	Prosentase BUMD Dalam Kondisi Sehat	Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD	Jumlah BUMD yang sehat	Jumlah BUMD		6		7		7		7		8		8		BAG. PEREKONOMIAN
				Persentase Peningkatan Dividen BUMD	%		2		2		3		3		4		4		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pengendalian dan Evaluasi BUMD	Laporan Monitoring dan Dokumen hasil Evaluasi BUMD	Laporan Evaluasi		1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	700.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
			Pelatihan Manajemen Untuk Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi	Peserta		43	100.000.000	43	100.000.000	45	100.000.000	45	100.000.000	45	100.000.000	221	500.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
			Kajian Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi	Dokumen Hasil Kajian Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi	Dokumen		1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
			Kajian Analisis Penyertaan Modal pada PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi	Dokumen Kajian Analisis Penyertaan Modal PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi	Dokumen		1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	BAG. PEREKONOMIAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah Terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi	Dokumen Kajian analisis Penyertaan Modal Terhadap BPRS Patriot Kota Bekasi	Dokumen		1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	BAG. PEREKONOMIAN
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Surat Menyurat dan Jasa Pengiriman Surat	Persen		100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	BAG. TATA USAHA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet	Rekening		144	7.000.000.000	144	7.000.000.000	144	7.000.000.000	144	7.000.000.000	144	7.000.000.000	144	35.000.000.000	BAG. UMUM
				Kebutuhan Sarana Komunikasi	Rekening		240		240		240		240		240				
				Kebutuhan Penerangan Listrik	Rekening		240		240		240		240		240				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2018	2019		2020		2021		2022		2023					
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Kebutuhan Air	Rekening		60		60		60		60		60		60				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenda	m2		20.675	1.183.650.000	20.675	1.183.650.000	20.675	1.183.650.000	20.675	1.183.650.000	20.675	1.183.650.000	103.375	1.183.650.000	BAG. UMUM		
				Meubelair	Buah		27.900		27.900		27.900		27.900		27.900		139.500				
				Tirai	m		500		500		500		500		500		2.500				
				panggung	m2		400		400		400		400		400		2.000				
				Karpet	m		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		30.000				
				AC	Buah		45		45		45		45		45		225				
				sound system	Watt		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000						
				spanduk	Buah		20		20		20		20		100						
				tahun	Tahun		1		1		1		1		5						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Peralatan Kebersihan	Jenis		10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	2.500.000.000	BAG. UMUM		
				Jasa Kebersihan	Bulan		12		12		12		12		12						
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor Setda kota Bekasi sesuai Kebutuhan	Jenis		61	360.000.000	61	360.000.000	61	360.000.000	61	360.000.000	61	360.000.000	1.800.000.000	BAG. UMUM
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jilid	Buku		350	250.000.000	350	250.000.000	350	250.000.000	350	250.000.000	1.750	1.800.000.000	BAG. UMUM	
							Penggandaan	Lembar		169.275		169.275		169.275		169.275		846.375			
Cetakan	Jenis						37	37	37	37		37									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Alat Listrik Penunjang Gedung dan Kantor di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi	Jenis		61	150.000.000	61	150.000.000	61	150.000.000	61	150.000.000	61	150.000.000	61	750.000.000	BAG. UMUM
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispenser	Buah		5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	25	1.800.000.000	BAG. UMUM
				Peralatan Rumah Tangga	Jenis		34		34		34		34		34				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unda ngan	harian & mingguan	eksemplar		150	155.000.000	150	155.000.000	150	155.000.000	150	155.000.000	150	155.000.000	750	1.800.000.000	BAG. TATA USAHA
				majalah	eksemplar		6		6		6		6		30				
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Box	Box		14.639	3.600.000.000	14.639	3.600.000.000	14.639	3.600.000.000	14.639	3.600.000.000	14.639	3.600.000.000	73.195	18.000.000.000	BAG. UMUM
				Porsi	Porsi		10.115		10.115		10.115		10.115		50.575				
				Dus	Dus		106.618		106.618		106.618		106.618		533.090				
				Nampan	Nampan		650		650		650		650		3.250				
				Kg	Kg		730		730		730		730		3.650				
				Buah	Buah		4.946		4.946		4.946		4.946		24.730				
				Tampah	Tampah		92		92		92		92		460				
				OK	OK		200		200		200		200		1.000				
				Paket	Paket		24		24		24		24		120				
				Pak	Pak		530		530		530		530		2.650				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Orang/Kegiatan		3.000	2.841.325.000	3.000	2.841.325.000	3.000	2.841.325.000	3.000	2.841.325.000	3.000	2.841.325.000	15.000	14.206.625.000	BAG. TATA USAHA
			Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa Administrasi Perkantoran	Orang/Bulan		1.494	10.315.500.000	1.494	10.315.500.000	1.494	10.315.500.000	1.494	10.315.500.000	1.494	10.315.500.000	7.470	51.577.500.000	BAG. UMUM
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kali Rakor		4	162.000.000	4	162.000.000	4	162.000.000	4	162.000.000	4	162.000.000	20	810.000.000	BAG. HUMAS
			Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	Rekomendasi Hibah/Bansos	Berkas		250	-	250	-	250	-	250	-	250	-	1.250	-	BAG. TATA PEMERINTAHAN
				Rapat Koordinasi	Kali		1		1		1		1		1		5		
			Penataan Arsip	Terselenggarakan Pemilahan dan Penataan Arsip	Tahun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	BAG. TATA USAHA
				rak arsip	Unit		7		7		7		7		7		35		
				lemari arsip	Unit		12		12		12		12		12		60		

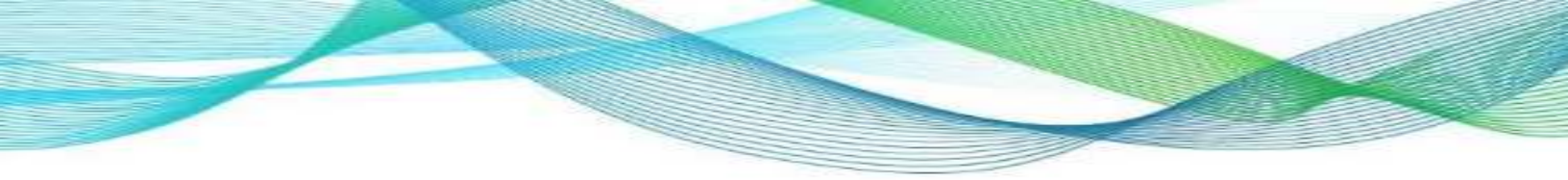
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
			Penyediaan Ruang Kerja	Jasa Sewa Rumah, Gedung, Gudang , Parkir, dan Lahan	Sewa Gudang Perlengkapan, Sewa Rumah/ Gedung/ Parkir/ Lahan		1	891.350.000	1	891.350.000	1	891.350.000	1	891.350.000	1	891.350.000	5	4.456.750.000	BAG. UMUM
				Jasa Sewa Rumah, Gedung, Gudang , Parkir, dan Lahan	bulan Service Fee MPP		11		11		11		11		11		55		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jenis Sewa	Jenis Sewa		1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	1.150.000.000	BAG. UMUM
				Mess	Mess		1		1		1		1		1		1		
				Rumah Dinas	Rumah Dinas		3		3		3		3		3		3		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lahan Parkir, awning	Lahan Parkir, awning		4	20.395.345.100	4	20.395.345.100	4	20.395.345.100	4	20.395.345.100	4	20.395.345.100	4	101.976.725.500	BAG. UMUM
				Gedung	Gedung		7		7		7		7		7		7		
				Bak Penampungan	Bak Penampungan		3		3		3		3		3		3		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjab	
							2018	2019		2020		2021		2022		2023				
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Lap.Tenis	Lap.Tenis		1		1		1		1		1		1			
				Pos Jaga	Pos Jaga		5		5		5		5		5					
				Building Management	Building Managem ent		1		1		1		1		1					
				Kolam Resapan	Kolam Resapan		2		2		2		2		2					
				Kolam Ikan	Kolam Ikan		6		6		6		6		6					
				Lokasi Taman, Peredam Suara	Lokasi Taman, Peredam Suara		8		8		8		8		8					
				Mall Pelayanan Publik	Mall Pelayanan Publik		1		1		1		1		1					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al	Jasa Pemeliharaa n Kendaraan Dinas Operasional di Setda	235 unit x 6 kali Pemelihar aan		1410	1.427.340.000	1410	1.427.340.000	1410	1.427.340.000	1410	1.427.340.000	1410	1.427.340.000	7.050	7.136.700.000		BAG. UMUM
				STNK	STNK		235		235		235		235		1.175					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Meubelair,Perl.Dapur,Pen gh.Ruangan, dan Alat Studio			4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	20	1.250.000.000		BAG. UMUM
				Tabung Gas	Buah		80		80		80		80		400					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjab wab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Bahan Pembersih	Jenis		23		23		23		23		23		23		
				Alat Listrik	Jenis		18		18		18		18		18		18		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan Perlengkapa n Gedung Kantor	Peralatan Kantor, Peralatan teknis, Peralatan Dapur dan Peralatan rumah Tangga, Peralatan Studio&Ko m		30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	5.000.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Papan Pengumuma n	Jenis		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000
			Perbaikan Meja		Jenis		1		1		1		1		1		1		
			Mimbar Rapat		Jenis		1		1		1		1		1		1		
			Kitchen set		Jenis		1		1		1		1		1		1		
			Lemari		Jenis		1		1		1		1		1		1		BAG. UMUM
			Podium		Jenis		1		1		1		1		1		1		
			Figura		Jenis		1		1		1		1		1		1		
			Sofa		Jenis		1		1		1		1		1		1		
			Kursi		Jenis		1		1		1		1		1		1		
			etalase		Jenis		1		1		1		1		1		1		
			Laundry Sofa&Kursi		Jenis		1		1		1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Bagi Aparatur Setda Kota Bekasi	Stel		360	500.000.000	360	500.000.000	360	500.000.000	360	500.000.000	360	500.000.000	1.800	2.500.000.000	BAG. UMUM
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu	Stel		47	125.000.000	47	125.000.000	47	125.000.000	47	125.000.000	47	125.000.000	235	625.000.000	BAG. TATA USAHA
			Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Seragam Olah Raga bagi Aparatur di Lingkungan Setda Kota Bekasi	Stel		360	300.000.000	360	300.000.000	360	300.000.000	360	300.000.000	360	300.000.000	1.800	1.500.000.000	BAG. UMUM
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat	Persen		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000		750.000.000	BAG. TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyelenggaraa n Capacity Building Aparatur	Jumlah Peserta Capacity Building	Orang		157	283.916.000	157	283.916.000	157	283.916.000	157	283.916.000	157	283.916.000	785	1.419.580.000	BAG. TATA USAHA
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SETDA	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000	BAG. TATA USAHA
				Dokumen Evaluasi Renja SKPD	Dokumen		4		4		4		4		4		20		
			Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Laporan		14	40.000.000	14	40.000.000	14	40.000.000	14	40.000.000	14	40.000.000	70	200.000.000	BAG. UMUM



Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap OPD sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

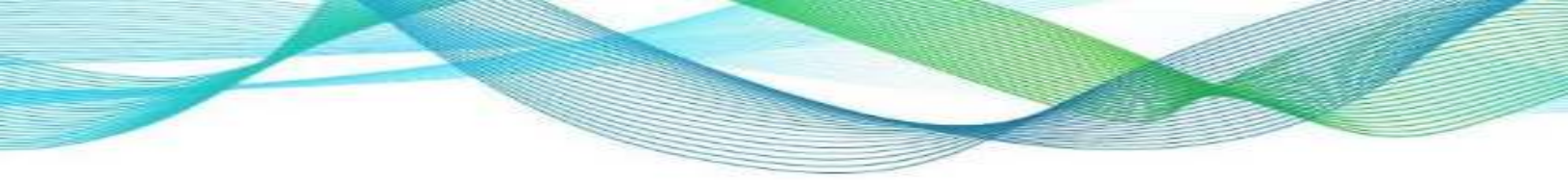
Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang pencapaiannya terkait langsung dengan pencapaian indikator kinerja RPJMD sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

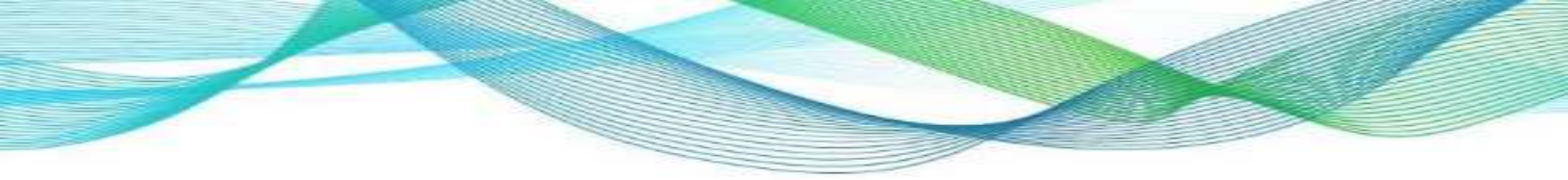
Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Transisi	I	II	III	IV	V	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Indikator Kinerja RPJMD									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,36	64,36	65,86	67,5	69,5	71,5	73,5	73,5
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	62,49	62,49	64	65,8	67,6	69,4	72	72
3	Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD	Nilai	3,1842	3,1842	3,2193	3,2544	3,2895	3,3249	3,3597	3,3597
4	Persentase peningkatan PAD	Rupiah	Rp. 1.999.01 8.742.15 9	Rp. 1.999.01 8.742.15 9	35,58%	11,70%	11,60%	11,60%	10,90%	Rp. 4.138.31 5.104.65 0
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78,33	78,33	79	80	81	82	83	83
	Indikator Kinerja Renstra									
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Capaian IKK yang meningkat	%	NA	NA	38	38	39	39	40	
3	Nilai IKM	Nilai	NA	NA	79	80	81	82	83	
4	Persentase peningkatan kualitas AKIP OPD (kategori “B” keatas)	%	NA	NA	32	45	57	70	83	
5	Persentase BUMD yang sehat	%	60	60	100	100	100	100	100	100



Sekretariat Daerah Kota Bekasi berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif**, memiliki kontribusi terhadap indikator kinerja RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi
 - b. Survey Kepuasan Masyarakat
 - c. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD
 - e. Penyusunan Dokumen Perencanaan
2. **Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD**, memiliki kontribusi terhadap indikator kinerja RPJMD yaitu Persentase peningkatan PAD, dengan kegiatan:
 - a. Pengendalian dan Evaluasi BUMD
 - b. Pelatihan Manajemen Untuk Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Kajian Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi
 - d. Kajian Analisis Penyertaan Modal pada PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi
 - e. Analisis Investasi Pemerintah Daerah Terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi



Bab VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Bab VIII

PENUTUP

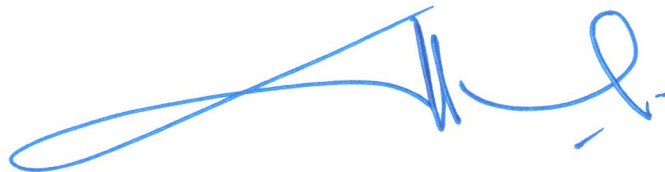
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI